

**“STUDI KOMPARATIF PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
MAGELANG DENGAN PENGADILAN NEGERI BLORA TENTANG
KONTRADIKTIF PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA”**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



AKUMAD NAMIL NIZANI

NIM. 1512110468

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 1440 H / 2018 M

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : "STUDI KOMPARATIF PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI MAGELANG DENGAN PENGADILAN
NEGERI BLORA TENTANG KONTRADIKTIF
PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA"

NAMA : AKHMAD KAMIL RIZANI

NIM : 1512110468

FAKULTAS : SYARI'AH

JURUSAN : SYARI'AH

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

JENJANG : STRATA SATU (S1)


Palangka Raya, 21 September 2018
Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Sadiani, MH

NIP.19650101 199803 1 003



Abdul Khair SH. MH.

NIP. 19681201 20003 1 003


Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Ketua Jurusan Syari'ah,


Munib, M.Ag

NIP.19600907 199003 1 002


Drs. Surva Sukti, MA

NIP.19650516 199402 1 002

NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi
Saudara Akhmad Kamil Rizani

Palangka Raya, 21 September 2018

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

NAMA : AKHMAD KAMIL RIZANI

NIM : 15121104 68

JUDUL : **"STUDI KOMPARATIF PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI MAGELANG DENGAN PENGADILAN NEGERI
BLORA TENTANG KONTRADIKTIF PENCATATAN
PERKAWINAN BEDA AGAMA"**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

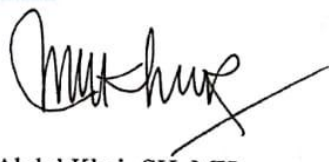
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Sadiani, MH
NIP.19650101 199803 1 003


Abdul Khair SH. MH.
NIP. 19681201 20003 1 003

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "STUDI KOMPARATIF PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAGELANG DENGAN PENGADILAN NEGERI BLORA TENTANG KONTRADIKTIF PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA", oleh AKHMAD KAMIL RIZANI, NIM :1512110468 telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :

Hari : **Senin**
Tanggal : **14 Muharram 1440**
24 September 2018

Palangka Raya, 24 September 2018

Tim Penguji :

1. <u>Munib, M.Ag.</u> Ketua Sidang	(.....) 
2. <u>Drs. Surya Sukti, MA</u> Penguji I	(.....) 
3. <u>Dr. Sadiani, M.H.</u> Penguji II	(.....) 
4. <u>Abdul Khair, M.H.</u> Sekretaris / Penguji	(.....) 

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya


H. SYAIKHU, MHI
NIP. 19711107 199903 1 005

“STUDI KOMPARATIF PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAGELANG DENGAN PENGADILAN NEGERI BLORA TENTANG KONTRADIKTIF PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA”

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini ialah adanya kontradiktif putusan dengan kasus yang serupa. Fokus penelitian ini tentang Kronologis pengajuan kasus Pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Blora, Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Blora, terjadinya kontradiktif putusan Pengadilan Negeri Magelang dengan Pengadilan Negeri Blora dan kajian hukum Islam menyikapi terjadinya kontradiktif antara Pengadilan Negeri Magelang yang mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama dan Pengadilan Negeri Blora yang menolak.

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, melalui studi kasus putusan Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Blora, teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif komparatif.

Hasil penelitian ini adalah kronologis pengajuan kasus pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Magelang adalah pemohon beragama Islam dan calon isteri pemohon beragama Katholik, sedangkan di Pengadilan Negeri Blora adalah pemohon beragama Islam dan calon suami Pemohon beragama Katholik, Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Magelang menggunakan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pengadilan Negeri Blora lebih menekankan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Terjadinya kontradiktif adalah pada putusan Pengadilan Negeri Magelang yang mengabulkan permohonan dan Pengadilan Negeri Blora yang menolak permohonan tersebut, kajian hukum Islam menyikapi terjadinya kontradiktif adalah cenderung menolak hal tersebut.

Kata Kunci:Komparatif, putusan, kontradiktif, Pencatatan Perkawinan beda Agama

“THE COMPARATIVE STUDY OF VERDICT OF MAGELANG DISTRICT COURT WITH BLORA DISTRICT COURT ABOUT REGISTRATION CONTRADICTIVE OF INTERFAITH MARRIAGE”

ABSTRACT

The background of the study was there was verdict contradictive with the similar cases. The focus of the study about the submission chronology of registration cases of interfaith marriage at Magelang and Blora district court, the judges consideration in decided the case of registration of interfaith marriage at Magelang district court and Blora district court, the occurrence of contradictive consideration of Magelang district court with Blora district court and the study of Islamic law adressed the contradictive between Magelang district court that granted the registration interfaith marriage and Blora district court that prevented it.

The methodology of the study used the research normative law approach, through the cases study of consideration of Magelang district court and Blora district court, the data collection technique used the documentation method then processed and analyzed by using the comparative descriptive method.

The result of the study was submission chronology of registration case of interfaith marriage at Magelang district court was the appellant was Islam and the appellant future wife was Catholic, whereas at Blora district court was the appellant was Islam and the appellant future husband was Catholic. The judges consideration in decided the case of interfaith marriage registration at Magelang district court used the article 35 letters A The law of Republic of Indonesia Number 23 in 2006 about the administration of the population and Blora district court more emphasized on the terms of article 2 verse (1) The law Number 1 in 1974 about the marriage, the occurrence of contradictive was the verdict of the Magelang district court that granted the application and Blora district court that prevented the application, the study of Islamic law adressed the occurrence of contradictive tended to reject it.

Keywords: Comparative, Verdict, Contradictive, Interfaith Marriage Registration

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. puji syukur hanya kepada Allah swt., yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, dan membekalinya dengan hati serta menganugraahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (skripsi). Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur peneliti kepada Allah swt. Tak lupa shalawat dan salam semoga tetap senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., *rahmatul lil 'ālamīn*, yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan berperadaban, yakni *ad-dīnul islām*.

Dapat terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang berkenan memberikan bantuan kepada peneliti. Untuk itu, peneliti ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, baik yang langsung maupun secara tidak langsung, telah membantu dalam penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya adalah:

1. Ayahanda H. Abdul Rahman dan Ibunda Hj. Noorlaila Hayani peneliti memberikan penghormatan dan penghargaan yang tak terhingga kepada mereka yang senantiasa memberikan motivasi semangat juang baik moril maupun materil hingga menjadi seperti sekarang. Serta kakanda tercinta Muhammad Hasbi Rahmani dan Noorfutriya Hayani.
2. Yth. Dr. Ibnu Elmi As Pelu, SH, MH, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya yang telah berjuang dalam alih status dari STAIN menjadi IAIN Palangka Raya. Terima kasih peneliti tuturkan atas segala rana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan

keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.

3. Yth. H. Syaikh, S.H.I, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Peneliti mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah. Semoga Fakultas Syariah semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu kesyariahan.
4. Yth. Usman, S. Ag. S.S. M.HI, selaku Kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta Stafnya, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan karya ini.
5. Yth. Dr. Sadiani, MH dan Abdul Khair SH. MH, selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing peneliti. Banyak pengetahuan baru yang peneliti dapatkan saat bimbingan. Peneliti berdoa semoga Allah mencatatnya sebagai amal *jarīyah* yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada beliau. *Āmīn*.
6. Yth. Dr. Syarifuddin, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran selama berkuliah di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan keluar di setiap permasalahan beliau beserta keluarga.
7. Yth. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.

8. Mahasiswa Program Studi HKI angkatan 2012 dan 2013 yang telah memberikan arahan dan saran kepada peneliti. Sahabat sekaligus keluarga baru peneliti di kampus, mahasiswa HKI angkatan 2014, Guru Ahyar, Guru Rifai, Guru Bana, Guru Bajuri, Ustadz Hasan, Rudi, Umam, Khomar, Husen, Majidi, Herman, Abdan, Najih, Dilah, saudara Liani, Puji, Dayah, Nurhalimah, Ely, Via, Eva, Nunung, serta Hj. Wardah, semoga Allah memudahkan kita semua.
9. Segenap Keluarga Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia kota Palangka Raya, Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Syariah, Keluarga Besar Mahasiswa IAIN Palangka Raya, Organisasi Kemahasiswaan, UKK/UKM IAIN Palangka Raya, DEMA Fakultas Syariah masa khidmat 206/2017, DEMA IAIN Palangka Raya masa khidmat 2017/2018 dan Keluarga Besar Basecamp yang selalu memberikan banyak hal berarti saat peneliti berkuliah.
10. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya satupersatu.

Kepada Allah peneliti mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. *Āmīn yā Mujīb as-Sā'ilīn*.

Akhirnya peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, disebabkan keterbatasan peneliti dalam banyak hal. Dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaannya. Terlepas dari kekurangan yang ada dalam penelitian ini, kepada Allah swt peneliti berserah

diri semoga apa yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya para pembaca. *Āmīn*.

Palangka Raya, September 2018

Penulis,

AKHMAD KAMIL RIZANI
1512110468



PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Kamil Rizani

NIM : 1512110468

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "STUDI KOMPARATIF PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAGELANG DENGAN PENGADILAN NEGERI BLORA TENTANG KONTRADIKTIF PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA", ini adalah hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, peneliti siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, September 2018



AKHMAD KAMIL RIZANI
1512110468

MOTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

(QS: Ar-Rum [30] : 21)



PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku persembahkan kepada Engkau ya Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa bersyukur, berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga dengan keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagi diriku untuk terus meraih cita-citaku.

Kupersembahkan Karya kecil ku kepada :

Kesatria hidupku

Ayahanda Abdul Rahman

Ayah telah banyak perjuangan mu untuk membesarkan diriku, telah banyak air keringat yang engkau berikan kepadaku dan telah banyak pengorbananmu untuk mendidik serta menjaga diriku.

Bidadari hidupku

Ibunda Noorlaila hayani

Ibu bagaimana aku harus berterimakasih kepadamu karena telah menyayangi dan mengasihiku semasa kecil hingga dewasa sekarang ini. Engkau adalah panutan ku untuk tetap menjadi kuat dan bersabar dalam menjalani hidup ini dan engkau juga menjadi penyemangat hidup ini.

Malaikat-malaikat ku

Muhammad Hasbi Rahmani dan Noorfitriya Hayani

Terimakasih telah berada di sampingku dan menjadi penyemangat diriku selama menjalani hidup ini.

Dan terakhir teman-teman seperjuanganku yang tak bisa ku sebutkan satu-persatu kalian sungguh teman terbaik dan luar biasa yang Allah ciptakan untuk mengisi hari-hari ku

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wawu	W	Em
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدین	ditulis	<i>muta'addidin</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	ditulis	A
◌ِ	Kasrah	ditulis	I
◌ُ	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>Ī</i>
كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	ditulis	<i>Ū</i>

فروض	ditulis	<i>Furūd</i>
------	---------	--------------

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	<i>Au</i>
قول	ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

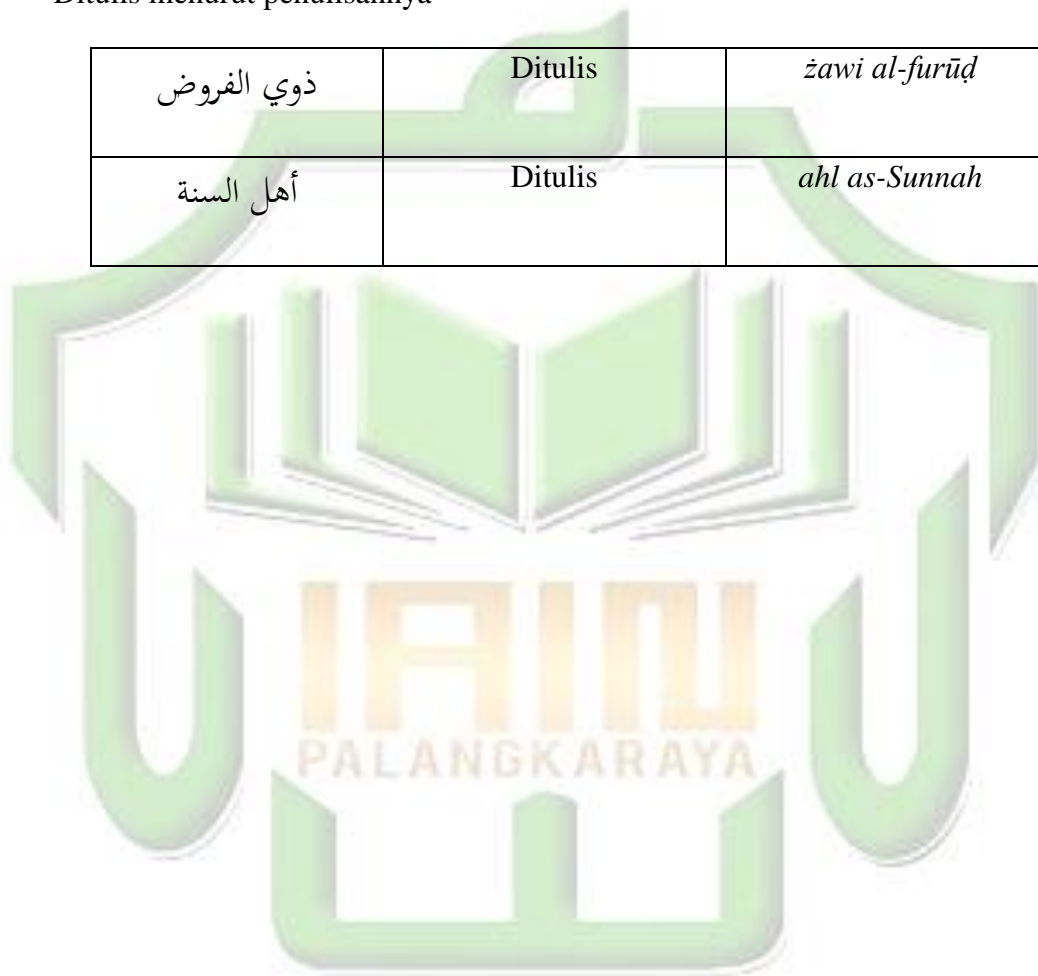
2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	i
NOTA DINAS	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	xi
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiv
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Batasan Masalah	7
F. Metodologi Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II KAJIAN TEORI DAN KONSEP PENELITIAN	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teoritik	18
1. Teori Kepastian Hukum.....	18

2. Teori Kemanfaatan Hukum.....	21
3. Teori Keberlakuan Hukum	21
4. Teori Ijtihad	24
5. Teori Kewenangan dan Kreativitas Hakim.....	25
C. Konsep Penelitian	27
D. Kerangka Pikir, Denah Penelitian dan Pertanyaan Penelitian	36
1. Kerangka Pikir	36
2. Denah Penelitian	36
3. Pertanyaan Penelitian.....	37
BAB III PENYAJIAN DATA	39
A. Isi Putusan Pengadilan Negeri Magelang	39
1. Posita (Duduk Perkara) Pengadilan Negeri Magelang	39
2. Petitum (Permohonan) Pengadilan Negeri Magelang.....	40
3. Ratio Decidendy (Pertimbangan Hukum oleh Hakim) Pengadilan Negeri Magelang.....	41
4. Amar Putusan Pengadilan Negeri Magelang	52
B. Isi Putusan Pengadilan Blora	53
1. Posita (Duduk Perkara) Pengadilan Negeri Blora	53
2. Petitum (Permohonan) Pengadilan Negeri Blora.....	57
3. Ratio Decidendy (Pertimbangan Hukum oleh Hakim) Pengadilan Negeri Blora.....	58
4. Amar Putusan Pengadilan Negeri Blora	69
BAB IV ANALISIS PUTUSAN.....	77
A. Kronologis Pengajuan Kasus Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Blora.....	77
1. Kronologis di Pengadilan Negeri Magelang.....	77

2. Kronologis di Pengadilan Negeri Blora	81
B. Latar Belakang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Blora tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama	87
1. Pertimbangan Yuridis Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Blora.....	92
2. Pertimbangan Non-Yuridis Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Blora.....	95
3. Pertimbangan filosofis Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Blora.....	97
C. Analisis Terhadap Kontradiktif putusan antar Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Blora	98
1. Analisis Yuridis Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Blora.....	99
2. Analisis Non-Yuridis Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Blora.....	103
3. Analisis Filosofis Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Blora.....	107
D. Tinjauan Hukum Islam atas Terjadinya Kontradiktif putusan antar Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Blora	110
BAB V PENUTUP.....	119
A. Kesimpulan	119
A. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	123



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan yaitu sebuah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974).¹ Sebuah perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan). Ini menunjukkan bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya (bagi yang non muslim), maka perkawinan tersebut adalah sah, terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat.²

Merujuk kepada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menentukan bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipilih keberlakuannya. Apabila hanya memenuhi salah satu ketentuan saja, maka peristiwa perkawinan tersebut belum memenuhi unsur hukum yang ditentukan oleh undang-undang. Pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa: Bagi yang beragama Islam pencatatannya oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2011, h. 21.

² Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2013, h. 25.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk. Bagi mereka yang bukan Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.³

Sebagai warga negara yang baik dan taat akan hukum yang berlaku di Indonesia, pasangan suami isteri sudah seharusnya melaksanakan Pencatatan perkawinan guna pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga. Maka dari itu pencatatan perkawinan sangat baik untuk dilaksanakan oleh setiap pasangan melalui tatacara administratif sesuai dengan agamanya masing-masing.

Secara administratif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan khususnya pasal 35 huruf a, hukum positif di Indonesia membuka kemungkinan pengakuan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia, dengan cara memohon penetapan pengadilan yang menjadi dasar dicatatkannya perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil. Menjadi alasan keabsahan perkawinan akan dinilai oleh Hakim Pengadilan Negeri dimana permohonan pengesahan perkawinan diajukan. Hal ini dilakukan karena

³ *Ibid.*, h. 27.

pencatatan perkawinan memberikan Perlindungan dan kepastian hukum tentang status pribadi yang diberikan oleh negara. dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan semua peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam wilayah Indonesia, adalah diberikan oleh negara. Selain itu Perkawinan merupakan peristiwa penting berkaitan dengan status hukum seseorang, sebagai hak sipil warga negara. Sehingga Pencatatan perkawinan merupakan tindakan administratif sebagai bukti autentik di bidang perkawinan yang diwujudkan berupa buku nikah atau akta perkawinan yang sah secara hukum.

Permasalahan yang muncul dari pemikiran penulis adalah adanya kontradiktif antara apa yang telah diatur di dalam uu perkawinan dengan ketentuan yang di atur oleh uu administrasi kependudukan, yaitu dalam UU perkawinan pasal 2 (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini tertuang dalam pasal 2 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa bagi yang beragama Islam pencatatannya oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 32 tahun 1954 tentang pencatat nikah, talak dan rujuk. Bagi mereka yang bukan Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil. Sedangkan di dalam UU administrasi kependudukan dalam pasal 34 dan diperjelas pada pasal 35 bahwa pencatatan pernikahan beda agama sah dengan penetapan pengadilan.

Menurut peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah menegaskan bahwa perkawinan harus dicatatkan,

Perkawinan di Indonesia harus dilaksanakan dengan tata cara menurut agama para pihak yang melaksanakan perkawinan. Konsekuensi dari ketentuan ini, pencatatan perkawinan menjadi persoalan tersendiri, sebab tidak semua pasangan yang akan melaksanakan perkawinan, memiliki kesamaan dalam kepercayaan agama. Beberapa pasangan yang keyakinan agamanya berbeda dapat menimbulkan beberapa permasalahan. Perkawinan beda agama menjadi fenomena yang kian marak terjadi di Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Magelang nomor : 04/pdt.P/2012/PN.MGL yang mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama sangat kontradiktif dengan putusan Pengadilan Negeri Blora nomor : 71/pdt.P/2017/PN Bla yang menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

Putusan Pengadilan Negeri Magelang, Yudi Kristanto (Islam) sebagai pemohon yang akan melaksanakan perkawinan beda agama dengan Yeni Aryono (Katholik), yang memutuskan mengabulkan permohonan pemohon untuk memberikan penetapan pengadilan untuk pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil.⁴ Sebaliknya dalam putusan Pengadilan Negeri Blora, Neneng Oktora Budi Asri (Islam) sebagai pemohon akan melangsungkan perkawinan dengan Yafet Arianto (Kristen) yang menolak permohonan pemohon.

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak selamanya terpaku pada satu asas, pada setiap perkara secara kasuistik, hakim dapat saja berubah-ubah dari asas yang satu ke asas yang lain. Hakim harus memperhatikan

pertimbangan hukum dengan nalar yang baik.⁵ Seorang hakim harus memahami, bahwa dia bertugas menerapkan hukum dan undang-undang melalui penafsirannya pada kasus yang dihadapinya, membawa atau mempunyai dampak pada perkembangan hukum. Oleh karena itu, dalam menafsirkan undang-undang pada kasus tertentu harus teliti, hati-hati dan mempertanggungjawabkan keputusannya kepada sejawat hakim lainnya, terutama dalam keadaan ketika perkembangan hukum masih harus disesuaikan dengan masyarakat Indonesia yang majemuk dan kompleks.⁶

Setiap ajaran agama Indonesia menolak adanya praktik pernikahan beda agama, namun dalam realitanya masih banyak penganut dalam suatu agam melakukan hal tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti sangat tertarik mengangkat untuk mengkajinya lebih mendalam yang dituangkan dalam sebuah bahasan skripsi yang berjudul: “STUDI KOMPARATIF PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAGELANG DENGAN PENGADILAN NEGERI BLORA TENTANG KONTRADIKTIF PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA”.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang yang peneliti uraikan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kronologis pengajuan kasus Pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Blora ?

⁵ Salim & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta : Rajawali Press, 2014, h. 32.

⁶ Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Bandung : Pustaka Setia, 2011, h. 229.

2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Blora ?
3. Mengapa terjadi kontradiktif putusan Pengadilan Negeri Magelang dengan Pengadilan Negeri Blora ?
4. Bagaimana kajian Hukum Islam menyikapi terjadinya kontradiktif antara Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Blora dalam memutuskan perkara pencatatan perkawinan beda agama tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mengkaji kronologis pengajuan kasus Pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Blora.
2. Mengetahui dan mengkaji Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Blora.
3. Mengetahui dan mengkaji terjadinya kontradiktif putusan Pengadilan Negeri Magelang dengan Pengadilan Negeri Blora.
4. Mengetahui dan mengkaji kajian Hukum Islam atas kontradiktif putusan Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Blora dalam perkara pencatatan perkawinan beda agama.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan teoritis dan kegunaan berbentuk praktis.

1. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah:
 - a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pandangan praktisi dan akademisi hukum Islam tentang penetapan perkawinan beda agama.
 - b. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur kesyariahan pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:
 - a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
 - b. Sebagai bahan pemikiran dan masukan kepada para ulama, praktisi hukum, masyarakat umum dan peneliti lain dalam memahami pandangan praktisi dan akademisi hukum Islam tentang penetapan perkawinan beda agama.

E. Batasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan mengenai hukum keluarga Islam yang meliputi bahasan tentang *nikah*, *talaq* (perceraian), *nasab* (keturunan), nafkah dan kewarisan maka dalam hal ini peneliti hanya membatasi pada persoalan pencatatan pernikahan, yaitu kontradiktif putusan Pengadilan Negeri Magelang

dengan Pengadilan Negeri Blora tentang pencatatan pernikahan beda agama, Dalam hal ini penulis mengajukan tiga rumusan masalah sebagai kristalisasi dari tema yang dijadikan sebagai fokus dalam penelitian.

Fokus kajian yang pertama, bagaimana Kronologis pengajuan kasus Pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Blora ?. Kedua, bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Blora ?. ketiga, mengapa terjadi kontradiktif putusan Pengadilan Negeri Magelang dengan Pengadilan Negeri Blora ?. keempat, Bagaimana kajian Hukum Islam menyikapi terjadinya kontradiktif antara Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Blora dalam memutuskan perkara pencatatan perkawinan beda agama tersebut ?.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau pustaka, Yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yakni aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu UU, serta bahasa hukum yang digunakan.⁷ Oleh karena itu fokus kajian dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006.

2. Pendekatan Penelitian

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Perss, 2010), hlm. 51.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Dalam pendekatan kasus, menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Putusan hakim yang digunakan adalah putusan yang telah memiliki hukum tetap. Pada saat membahas putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer telah dikatakan bahwa yang memiliki kekuatan hukum adalah pada bagian *ratio decidendi*-nya.⁸ Sedangkan pendekatan perbandingan, melakukan perbandingan hukum dengan tujuan untuk “*Finding out what the law is on other countries, and considering whether it can be adapted, with or without modifications lead to law reforms or development of law*”.⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi. Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berbagai hal yang ada hubungannya dengan penetapan pengadilan negeri Magelang dan Penetapan pengadilan negeri Blora tentang pencatatan perkawinan beda agama, baik sumber primer maupun sumber sekunder yang berupa catatan, transkrip, buku, jurnal dan artikel yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dan disusun kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-komparatif.¹⁰ Dengan menggunakan metode deskriptif-komparatif penulis akan melakukan pelacakan dan analisis terhadap putusan

⁸ Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: 2014, h. 119.

⁹ *Ibid.*, h. 131.

¹⁰ Lihat Muhammad Amin Sayyad, “Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution Tentang Urgensi Pencatatan Nikah Masuk Rukun Nikah”, *Skripsi Sarjana*, Palangkaraya: Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya, 2017, h. 16, t.d.

pengadilan negeri Magelang dan pengadilan negeri Blora tentang pencatatan perkawinan beda agama.

Cara kerja metode deskriptif-komparatif ini adalah dengan cara menganalisis data yang dipaparkan kemudian dibandingkan antara keduanya, dan selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan. Untuk mempertajam analisis, penulis juga menggunakan metode *content analysis*.

5. Sumber Data

Sumber data dalam perspektif penelitian adalah asal dari sebuah keterangan atau informasi yang diperoleh pada saat penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data atau informasi yang diperoleh dari sumber pertama dari obyek penelitian.¹¹ Dalam hal ini, putusan pengadilan negeri Magelang dan pengadilan negeri Blora.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua,¹² artinya bukan data yang secara langsung diperoleh dari pasal tersebut. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, pendapat pakar hukum dan lain-lain.

¹¹Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, h. 30.

¹²Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2003, h. 3.

c. Sumber data tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan Sumber data yang bersifat menunjang atau pelengkap.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam 4 bab, sebagai berikut :

Bab I, pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

Bab II, kajian teori dan konsep yang terdiri dari : Penelitian terdahulu, kajian teori, meliputi teori perkawinan, teori kemanfaatan hukum, teori kepastian hukum, teori keberlakuan hukum, teori kewenangan dan kreatifitas hakim dan teori ijtihad. Kemudian mengenai konsep penelitian ialah definisi pencatatan, definisi perkawinan, definisi beda agama, definisi perbandingan hukum.

Bab III, metode penelitian terdiri dari waktu penelitian, jenis pendekatan penelitian, subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan metode pengolahan dan analisis data.

Bab IV, penyajian dan analisis data tentang kronologis pengajuan kasus pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Blora, Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Blora, terjadi kontradiktif putusan Pengadilan Negeri Magelang dengan Pengadilan Negeri Blora dan kajian Hukum Islam menyikapi

terjadinya kontradiktif antara Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Blora dalam memutuskan perkara pencatatan perkawinan beda agama tersebut.

Bab V, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN TEORI DAN KONSEP PENELITIAN

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik berasal dari perpustakaan, website, dan sebagainya, peneliti menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian penulis, yaitu:

1. Intan Pratiwi tahun 2014, fakultas psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Pernikahan Pasangan Beda Agama” penelitian ini terfokus kepada aspek-aspek mengapa terjadinya pernikahan beda agama.

Hasil analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa 1) pengambilan keputusan menikah beda agama didasarkan emosi, rasa cinta terhadap pasangan dan rasa ingin hidup bersama, tanpa memikirkan dampak atas keputusan tersebut, 2) cara untuk menikah dengan mengikuti agama dari satu pihak terlebih dahulu, setelah menikah kembali ke agama semula, 3) banyak masalah yang muncul setelah menikah, pelaku pernikahan beda agama mengalami konflik batin perasaan bersalah, perselisihan terus-menerus, tekanan pihak keluarga, kerinduan kesamaan iman, pemilihan agama pada anak.¹³

2. Siti Fina Rosiana Nur tahun 2012, fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan judul “Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak yang dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan” penelitian ini terfokus kepada mengenai keabsahan perkawinan beda agama menurut Undang-

¹³Intan Pratiwi, Pernikahan Pasangan Beda Agama, (skripsi), Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, t.d. <http://eprints.ums.ac.id/31792/2/03>. Halaman Depan.pdf (diakses 22 Februari 2018)

Undang No 1 Tahun 1974 dan juga mengenai kewarisan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan beda agama menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah perkawinan yang sah, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dari Pasal 2 ayat (1) dapat disimpulkan bahwa undang-undang perkawinan menyerahkan sahnyanya suatu perkawinan dari sudut agama, jika suatu agama memperbolehkan perkawinan beda agama maka perkawinan agama boleh dilakukan tetapi jika suatu agama melarang perkawinan beda agama maka melakukan tidak boleh melakukan perkawinan beda agama. dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa setiap agama di Indonesia melarang untuk melakukan perkawinan beda agama. Oleh karena itu, perkawinan beda agama adalah perkawinan yang tidak sah menurut undang-undang perkawinan. Serta akibat terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama terkait masalah kewarisan yaitu tidak ada hak kewarisan dari orang yang beda agama sehingga anak yang lahir dari perkawinan beda agama hanya bisa mendapatkan kewarisan melalui wasiat wajibah yang besarnya tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$.¹⁴

3. Ratna Jati Ningsih tahun 2012, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Surakarta dengan judul “Perkawinan Beda Agama (Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah)” penelitian ini terfokus untuk mengetahui Bagaimana substansi penafsiran Quraish Shihab tentang Perkawinan Beda Agama? Dan

¹⁴ Siti Fina Rosiana Nur, Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak yang dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan, (Skripsi), Depok: Universitas Indonesia, 2012, t.d. <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20309013-S42529-Perkawinan%20beda.pdf> (Diakses 22 Februari 2018).

Bagaimana relevansi penafsiran Quraish Shihab tentang Perkawinan Beda Agama dalam konteks Indonesia?.

Hasil penelitian ini antara lain; 1). Quraish Shihab berpendapat bahwa sesungguhnya Islam memperbolehkan perkawinan antara Muslim dengan Muslimah dan Muslim dengan wanita Ahl Kitab an sich. Sedangkan yang dimaksud Ahl Kitab disitu adalah Yahudi dan Nasrani. Sedangkan yang diluar ketentuan tersebut diharamkan meskipun hal itu utopis untuk bisa dilakukan karena masih harus memenuhi beberapa ketentuan menurut versi Quraish, seperti halnya wanita tersebut harus benar-benar berpegang teguh dengan agamanya (kitabnya) dan wanita yang muhsanat (menjaga moralnya), oleh karena itu lebih baik tidak melakukan karena sama-sama menikah lebih baik dengan yang seiman tidak beresiko dikemudian hari. 2). Pemikiran Quraish tentang Perkawinan Beda Agama di atas sangat relevan dengan kondisi kultur di Indonesia, sekalipun ini Negara demokrasi namun tetap ada batasannya. Perkawinan Beda Agama adalah bentuk perkawinan yang bermasalah dalam dirinya, oleh karena itu sikap Negara yang tidak melindungi bentuk perkawinan tersebut sudah tepat. Karena melindungi hal yang bertentangan dengan konstitusi adalah sama halnya dengan tindakan extra ordinary crime.¹⁵

4. Youhastha Alva Tryas Mahardhika tahun 2010, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Studi Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Se Kota Yogyakarta Terhadap Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006)” penelitian ini terfokus kepada studi lapangan berupa pandangan/pendapat kepala KUA di Yogyakarta.

Dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Se Kota Yogyakarta Terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama yang *pertama*

¹⁵ Ratna Jati Ningsih, Perkawinan Beda Agama (Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah), (Skripsi), Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2012, t.d. <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/421/1/Perkawinan%20Beda%20Agama.pdf> (diakses 22 Februari 2018).

adalah merasa keberatan dan merasa diresahkan dengan adanya pasal 35 huruf (a) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 ini. Kedua adalah Pasal 35 huruf (a) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 dianggap berbenturan dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan KHI. Ketiga adalah Undang-undang nomor 23 tahun 2006 dianggap rancu dan tidak jelas, karena Undang-undang tersebut notabene adalah Undang-undang yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), tetapi kenapa harus membahas tentang masalah pernikahan. *Keempat* adalah perlu diadakan revisi atau peninjauan ulang.¹⁶

Berdasarkan dari enam penelitian terdahulu yang telah peneliti sebutkan di atas, masing-masing memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Adapun persamaan dan perbedaannya dapat dilihat pada tabel berikut :

¹⁶ Youhastha Alva Tryas Mahardhika, Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Studi Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Se Kota Yogyakarta Terhadap Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006), (Skripsi), Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, t.d.<http://digilib.uin-suka.ac.id/5827/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> (diakses 22 Februari 2018).

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Nama, Judul, Tahun, dan Jenis Penelitian	Perbandingan	
		Persamaan	Perbedaan
1.	Intan Pratiwi, "Pernikahan Pasangan Beda Agama", 2014, kajian lapangan.	Nikah beda agama	Perbedaannya dapat dilihat pada fokus penelitian, yakni Intan Pratiwi fokus kepada aspek-aspek mengapa terjadinya pernikahan beda agama. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah pada kontradiktif putusan Pengadilan Negeri Magelang dengan Pengadilan Negeri Blora tentang pencatatan perkawinan beda agama.
2.	Siti Fina Rosiana Nur, "Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak yang dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan", 2012, kajian pustaka.	Nikah beda agama	Perbedaannya fokus penelitian Siti Fina Rosiana Nur kepada mengenai keabsahan perkawinan beda agama menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan juga mengenai kewarisan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah pada kontradiktif putusan Pengadilan Negeri Magelang dengan Pengadilan Negeri Blora tentang pencatatan perkawinan beda agama.
3.	Ratna Jati Ningsih "Perkawinan Beda Agama (Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah)", 2012, kajian pustaka.	Nikah beda agama	Perbedaannya fokus penelitian Ratna Jati Ningsih adalah fokus untuk mengetahui Bagaimana substansi penafsiran Quraish Shihab tentang Perkawinan Beda Agama? Dan Bagaimana relevansi penafsiran Quraish Shihab tentang Perkawinan Beda Agama dalam konteks Indonesia. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah pada kontradiktif putusan Pengadilan Negeri Magelang dengan Pengadilan Negeri Blora tentang pencatatan perkawinan

			beda agama.
4.	Youhastha Alva Tryas Mahardhika, "Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Studi Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Se Kota Yogyakarta Terhadap Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006), 2010, kajian lapangan.	Pencatatan nikah beda agama	Perbedaannya fokus penelitian Youhastha Alva Tryas adalah pandangan/pendapat kepala KUA di Yogyakarta. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah pada kontradiktif putusan Pengadilan Negeri Magelang dengan Pengadilan Negeri Blora tentang pencatatan perkawinan beda agama.

B. Kerangka Teoritik

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.¹⁷ Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Negara hukum Indonesia menghendaki menegakkan hukum dan keadilan, sehingga kepastian hukum dan keadilan harus menjadi produk putusan hakim.¹⁸

¹⁷ Donald Albert Rumokoy & Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, h. 141.

¹⁸ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta: Kencana, 2012, h. 211.

Menurut Utrecht, apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasar inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal ini hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya.¹⁹

Professor Satjipto Rahardjo membahas masalah kepastian hukum dengan menggunakan perspektif sosiologis dengan sangat menarik dan jelas. Berikut kutipan pendapatnya, Setiap ranah kehidupan memiliki semacam ikon masing-masing. Untuk ekonomi ikon tersebut adalah efisiensi, untuk kedokteran; mengawal hidup dan seterusnya. Ikon untuk hukum modern adalah kepastian hukum. Setiap orang akan melihat fungsi hukum modern sebagai menghasilkan kepastian hukum. Masyarakat terutama masyarakat modern, sangat membutuhkan adanya kepastian hukum dalam berbagai interaksi antara para anggotanya dan tugas itu diletakkan di pundak hukum.²⁰

Ali²¹ mengutip pendapat Gustaf Radbruch (1878-1949), tentang Ajaran Prioritas Baku untuk menjelaskan istilah kepastian hukum. Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengemukakan bahwa tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan utama hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik

¹⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 22.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006, h. 133-136.

²¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, h. 287-288.

adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Keadilan yang dimaksudkan oleh Radbruch adalah keadilan dalam arti yang sempit yakni kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Kemanfaatan atau finalitas menggambarkan isi hukum karena isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang mau dicapai oleh hukum tersebut. Kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.²²

Berdasarkan uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak

²² Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007, h. 95.

menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat.

2. Teori Kemanfaatan Hukum

Tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat dan hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam perspektif utilitarianisme, kemanfaatan adalah tujuan utama dari hukum dan kemanfaatan dalam konteks ini dimaknai sebagai kebahagiaan atau kesenangan (*happiness*). Sehingga yang ditekankan bukanlah adil atau tidaknya suatu hukum, melainkan sampai sejauh mana hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka hukum harus mencapai empat tujuan, yaitu memberi sumber nafkah hidup (*subsistence*), kecukupan (*abundance*), keamanan (*security*), dan kesetaraan (*equality*).²³

3. Teori Keberlakuan Hukum

Peraturan perundang-undangan tertulis pada dasarnya menempati posisi yang penting dalam dunia hukum modern saat ini. Dalam kajian ilmu hukum, ada tiga faktor yang menjadi parameter sebuah peraturan perundang-undangan dapat berlaku secara baik, yakni mempunyai keberlakuan Yuridis, Sosiologis dan Filosofis.

a. Keberlakuan Yuridis

²³ Atif Latipulhayat, *Khazanah Jeremy Bentham*, Bandung: Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, volume Nomor 2 Tahun 2015.

Yuridis atau normatif suatu peraturan tau kaidah akan berlaku jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu, yang dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk atau memiliki keterkaitan yang satu dengan yang lain.

Keberlakuan Yuridis dari kaidah hukum menurut Bagir Manan diperinci dengan syarat-syarat sebagai berikut : pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis atau peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama jika diperintah oleh peraturan perundang-undangan pada tingkat yang lebih tinggi atau sederajat. Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, maka peraturan perundang-undangan batal demi hukum atau belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

b. Keberlakuan Sosiologis

Dasar keberlakuan secara sosiologis atau empiris maksudnya ialah jika para warga masyarakat mematuhi hukum dimana hukum itu diberlakukan. Keberlakuan sosiologis dapat dilihat melalui sarana riset empiris tentang perilaku warga masyarakat. Jika riset menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku dengan mengacu kepada keseluruhan kaidah hukum, maka terdapat keberlakuan empiris

kaidah hukum. Dengan demikian, norma hukum mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

c. Keberlakuan Filosofis

Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee*, yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, pemanfaatan dan ketertiban maupun kejaahatan dan sesuai dengan moralitas.²⁴ Cita hukum tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai, maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.²⁵

Dalam perspektif utilitarianisme, kemanfaatan adalah tujuan utama dari hukum dan kemanfaatan dalam konteks ini dimaknai sebagai kebahagiaan atau kesenangan (*happiness*). Sehingga yang ditekankan bukanlah adil atau tidaknya suatu hukum, melainkan sampai sejauh mana hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka hukum harus mencapai empat tujuan, yaitu memberi sumber nafkah hidup (*subsistence*), kecukupan (*abundance*), keamanan (*security*), dan kesetaraan (*equality*).²⁶

²⁴ Donald Albert Rumokoy & Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, h. 139.

²⁵ Sadiani, *Nikah via Telepon Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Malang: Intimedia, 2008, h. 152

²⁶ Atif Latipulhayat, *Khazanah Jeremy Bentham*, Bandung: Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, volume Nomor 2 Tahun 2015.

4. Teori Ijtihad

Secara bahasa ijtihad berasal dari kata : ijtahada- yajtahidu, yang berarti bersungguh-sungguh dalam menggunakan tenaga, baik fisik maupun pikiran. Ijtihad hanya digunakan terhadap hal-hal yang mengandung kesulitan. Menurut istilah, ijtihad adalah pengerahan segenap kemampuan untuk menemukan hukum syara' melalui dalil-dalil yang rinci dengan metode tertentu. Para ulama memberikan definisi sebagai berikut :

- a. Abdul Wahab Khalaf : ijtihad adalah pengerahan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara' dari dalil yang terinci yang bersumber dari dalil syara'.
- b. Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa ijtihad adalah pengerahan kemampuan oleh seorang faqih (mujtahid) dalam menghasilkan hukum syara'.
- c. Wahbah Zuhaily mengemukakan bahwa ijtihad adalah usaha yang sungguh-sungguh dari seorang ahli hukum dalam mencari tahu tentang hukum-hukum syara'.²⁷

Dengan demikian dinamakan ijtihad jika memenuhi tiga unsur, yaitu : usaha yang sungguh-sungguh, menemukan atau mengistinbath hukum Islam, dan menggunakan dalil-dalil yang rinci. Pertama, tidak dinamakan ijtihad jika usaha dilakukan tidak sungguh-sungguh. Kesungguhan ini menunjukkan perlunya kualifikasi atau kemampuan bagi mereka yang ingin melakukan ijtihad.

²⁷ Ali Sodikin, Dkk, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Buku Materi Pembelajaran Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, h. 85.

Persyaratan ini sekaligus membatasi pelaksanaan ijtihad, yaitu hanya bagi mereka yang memiliki kemampuan dan ketrampilan yang berhubungan dengan masalah yang diijtihadi.

Kedua, tujuan ijtihad adalah untuk menemukan atau merumuskan ketetapan hukum Islam, yang belum ada kepastian hukumnya dalam al-Qur'an maupun Hadis. Konsekuensinya, tidak perlu berijtihad untuk hal-hal yang sudah pasti ketetapan hukumnya di dalam sumber hukum Islam.

Ketiga, menggunakan dalil-dalil yang rinci, yaitu dalil yang bersumber dari nash al-Qur'an dan Hadis. Dalam kajian fiqh dan ushul fiqh, ijtihad menjadi sumber hukum yang ketiga, setelah al-Qur'an dan Hadis.²⁸ Meskipun ketiga, namun kedudukan ijtihad sangat penting, karena nash tidak dapat menjelaskan dirinya sendiri tanpa bantuan akal manusia. Kerja akal (ra'yu) manusia inilah yang disebut dengan ijtihad.²⁹

5. Teori Kewenangan dan Kreativitas Hakim

²⁸ *Ibid.*, h. 88.

²⁹ Adapun dasar hukum berlakunya ijtihad adalah

1. Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 105 :

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِيِينَ خَصِيمًا

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat,

2. Hadis yang membolehkan hakim berijtihad :

الْحَاكِمُ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِنْ جْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ

“Hakim apabila berijtihad kemudian dapat mencapai kebenaran maka ia mendapat dua pahala. Apabila ia berijtihad kemudian tidak mencapai kebenaran, maka ia mendapat satu pahala”

Hakim dalam mengambil suatu keputusan merujuk pada Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yakni pasal 60A ayat (1) disebutkan “Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya”. Selanjutnya dijelaskan pada ayat (2) “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.³⁰

Seorang hakim tidak luput dari tuntutan untuk kreatif dalam mempertimbangkan suatu masalah hukum, UU No. 48 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain: (1) “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Berkaitan dengan hal ini maka *Ratio Decidendi* seorang hakim akan menjadi dasar dalam mencari putusannya.³¹

Dalam perspektif Pound dan Dworkin, hakim merupakan pengemban hukum praktis yang menjadi tulang punggung dalam kegiatan penalaran hukum. Namun demikian, peran hakim dalam suatu tradisi hukum sangatlah berbeda tradisi hukum *common law*, hakim menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam pembentukan hukum. Karena pada hakekatnya *common law* alah sebuah *judge made law*, artinya hukum yang dibentuk oleh peradilan hakim-

³⁰ Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 60A Ayat (1) dan (2)

³¹ Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 Ayat (1)

hakim kerajaan dan dipertahankan berkat kekuasaan yang diberikan kepada preseden-preseden (putusan) hakim-hakim.³²

C. Konsep Penelitian

1. Definisi Pencatatan Perkawinan

a. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam.³³

Merujuk kepada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menentukan bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipilih keberlakuannya. Apabila hanya memenuhi salah satu ketentuan saja, maka peristiwa perkawinan tersebut belum memenuhi unsur hukum yang ditentukan oleh undang-undang.

b. Ketentuan Hukum yang Mewajibkan Pencatatan Perkawinan

Ketentuan hukum yang mewajibkan adanya pencatatan perkawinan terdapat pada :

³²Sadiani, *Nikah Via Telepon...*, h. 201-202

³³ Saefuddin Afief, *Notaris Syariah dalam Praktik Jilid Ke 1 Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Darunnajah Publishing, 2011, h. 137

- 1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terdapat dalam pasal 2 ayat (2) :

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

- 2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa:

- 1) Bagi yang beragama Islam pencatatannya oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk.
- 2) Bagi mereka yang bukan Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.³⁴

c. Tujuan dan Manfaat Pencatatan Perkawinan

Tujuan pencatatan perkawinan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga negara sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya akan memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan, sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapa pun di hadapan hukum dan

³⁴ Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, h. 107

terciptanya kepastian hukum yang membantu proses terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.³⁵

2. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan dalam hal ini dapat ditinjau dari dua sudut pandang yaitu menurut Hukum Islam dan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

a. Menurut Hukum Islam

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan nikah, yang bermakna wath'u, adhammu , aqad dan jam'u.³⁶ Wath'u yang bermakna menggauli, bersetubuh atau bersenggama. Adhammu bermakna mengumpulkan, menyatukan dan memeluk. Aqad yang bermakna mengikat dan jam'u bermakna mengumpulkan, menyatukan dan menyusun.³⁷

Perkawinan menurut ulama Fiqih, antara lain sebagai berikut :

- 1) Ulama Hanafiyah, mendefinisikan bahwa perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah (laki-laki memiliki perempuan dengan seutuhnya) dengan sengaja.
- 2) Ulama Syafi'iyah, menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang menjamin kepemilikan dengan menggunakan lafadz nikah atau tajwiz yang menyimpan arti memiliki keturunan.

³⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016, h. 58

³⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005, h. 43

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. Ke-3 Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009, h. 36

- 3) Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata
- 4) Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwij untuk mendapatkan kepuasan.³⁸

Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan, dari semua perbedaan pendapat ada satu unsur kesamaan yakni perkawinan merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah dan disertai dengan adanya perjanjian yang sangat kuat³⁹ atau mitsaqan ghalidzan sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁴⁰

b. Menurut undang-undang perkawinan

³⁸ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam...*, h. 45

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, h. 62.

⁴⁰ Ar-Rum [30] : 21.

Perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang termuat dalam pasal 1 ayat 2, yaitu :

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁴¹

Pencatuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa erat kaitannya dengan sila pertama dalam Pancasila. Ini merupakan pernyataan tegas bahwa perkawinan memiliki hubungan erat dengan agama dan kerohanian sehingga perkawinan memiliki unsur jasmani dan rohani.

Nikah merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Suatu yang haram bagi seseorang, kemudian berubah menjadi halal dengan sarana pernikahan. Implikasi pernikahan sangat besar, luas dan beragam. Pernikahan juga merupakan suatu saran awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat, yang dimana jika unit – unit keluarga baik dan berkualitas maka bisa dipastikan masyarakat yang diwujudkan akan kokoh dan baik. Apabila dilihat dari sifatnya yang menjangkau sangat luas, pernikahan memiliki makna sangat strategis dalam kehidupan sebuah bangsa. Dalam konteks ini pemerintah menjadi berkepentingan dalam mengatur institusi pernikahan, agar tatanan masyarakat yang teratur dan tentram bisa diwujudkan. Hal ini tercermin dalam Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 yang merupakan bentuk konkret pengaturan pemerintah tentang perkawinan kepada warga negaranya.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, h. 40.

Demikian pula bahwa setiap perkawinan diharapkan dapat membentuk keluarga yang kekal, untuk mencapai tujuan yang luhur tersebut maka di dalam Undang-undang perkawinan ditetapkan adanya prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Asas-asas perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut :

1) membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal. Untuk itu suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material.

2) Sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama

Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya.

3) Monogami

Undang – undang ini menganut asas monogami. Namun apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang maka harus mengikuti peraturan – peraturan yang berlaku mengenai hal itu dan syaratnya terpenuhi dan diputuskan oleh pengadilan.

4) Pendewasaan usia perkawinan

Undang – undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri harus telah mencapai jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, agar

supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian dan mendapat dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

5) Mempersukar perceraian

Karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta sejahtera, maka perundang – undangan mengatur pelaksanaannya yang harus dilakukan dihadapan sidang pengadilan.

6) Kedudukan suami istri seimbang

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga

7) Asas pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan mempermudah dalam mengetahui setiap manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan dan untuk tujuan ketertiban administrasi suatu bangsa.⁴²

3. Definisi beda agama

Dalam abad kemajuan teknologi komunikasi modern dewasa ini, pergaulan manusia tidak lagi terbatas hanya dalam satu lingkungan masyarakat yang kecil dan sempit seperti golongan, suku, agama dan rasnya saja tetapi hubungan manusia telah berkembang dengan begitu pesatnya satu dengan yang lain sehingga menembus dinding-dinding batasan golongan, suku, ras dan agamanya. Dalam kondisi pergaulan yang seperti itu maka bukan suatu hal yang

⁴² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Ke-2, Jakarta: SinarGrafika, 2007, h. 8.

mustahil untuk membuka peluang terjadinya perkawinan antar suku, antar golongan, antar ras dan antar agama.

Sebagai negara yang besar Indonesia mempunyai beragam etnis, suku, bangsa, budaya serta agama. Konstitusi menjamin setiap pemeluk agama bebas menjalankan dan mengamalkan agamanya masing-masing dengan seluas-luasnya. Setiap agama mengajarkan kebaikan kepada pemeluknya, meskipun prinsip-prinsip dasarnya berbeda-beda. Kebaikan yang diajarkan agama mempunyai dimensi yang universal, sehingga antara pemeluk agama diharuskan untuk mengamalkan ajaran agamanya agar tercipta keharmonisan antar umat beragama.

Keharmonisan antar umat beragama akan melahirkan nilai-nilai positif tersendiri bagi masyarakat, namun juga terkadang dapat menimbulkan permasalahan tersendiri, sebagai contoh adalah ketika dua insan manusia yang berbeda jenis kelamin dan saling menyayangi, saling mengasihi, mereka menghendaki ikatan suci yaitu sebuah perkawinan, sementara agama mereka berbeda dan masing-masing dari mereka tetap berprinsip teguh pada keyakinan agamanya masing-masing. Hal inilah yang menimbulkan permasalahan tersendiri, karena hukum perkawinan di Indonesia menentukan bahwa perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa tiada agama yang memperbolehkan umatnya melangsungkan perkawinan dengan umat agama lain.

Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh sepasang calon suami istri yang menganut agama berbeda pada saat melangsungkan perkawinannya. Menurut Rusli dan R. Tama perkawinan beda agama berarti,

perkawinan yang dilangsungkan antara pasangan yang berbeda agama satu sama lain. Selain itu istilah lain dari perkawinan beda agama ialah perkawinan antar agama yang diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena beda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tatacara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴³

4. Definisi Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum, dalam bahasa inggris umumnya disebut comparative law, yang jika diterjemahkan secara harfiah berarti “hukum perbandingan”. Perbandingan hukum merupakan suatu metode untuk mempelajari hukum dan penelitian dengan cara membandingkan.

Dalam memperbandingkan hukum dikenal dua cara, yaitu memperbandingkan secara makro dan secara mikro. Perbandingan secara makro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum pada umumnya. Perbandingan secara mikro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum tertentu. Tidak ada batasan tajam antara perbandingan secara makro dan mikro. Menurut H.C. Gutteridge, perbandingan hukum adalah proses perbandingan peraturan-peraturan hukum yang diambil dari sistem-sistem yang berbeda. jadi, yang dilakukan adalah membanding-bandingkan antara peraturan-peraturan atau antara sistem-sistem hukum.⁴⁴

⁴³ Rusli dan R. Tama, *Perkawinan antar Agama dan Permasalahannya*, Bandung: Pionir jaya, 2000, h. 11.

⁴⁴ Donald Albert Rumokoy & Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*..., h. 171.

D. Kerangka Pikir, Denah Penelitian dan Pertanyaan Penelitian

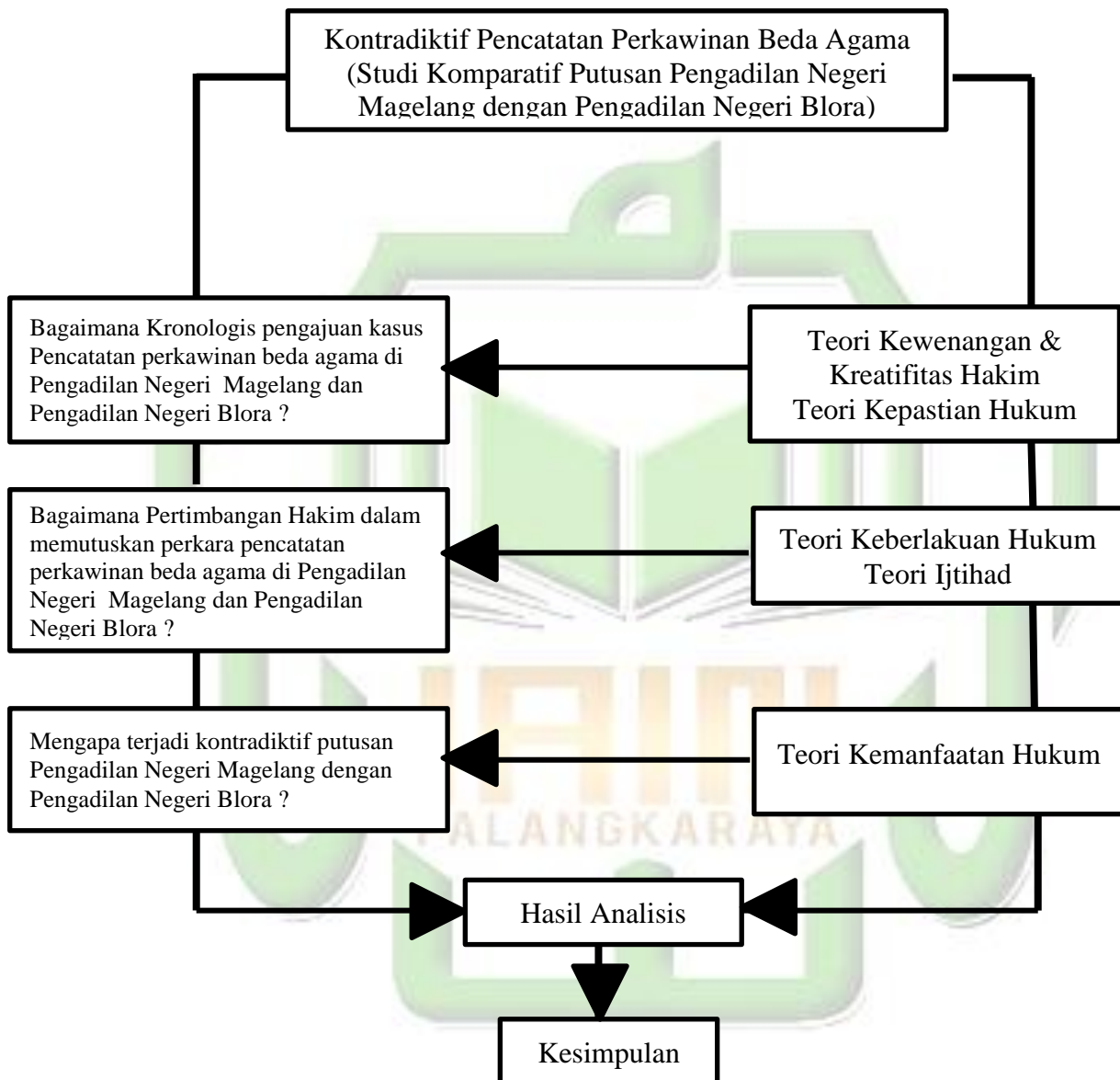
1. Kerangka Pikir

Penelitian ini berawal dari pencermatan peneliti tentang adanya kontradiktif pencatatan perkawinan beda agama di dua pengadilan negeri di Indonesia yang peneliti temui pada pengadilan negeri Magelang dan pengadilan negeri Blora. Kontradiktif tersebut, karena pengadilan negeri Magelang dalam putusannya mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama, sedangkan pengadilan negeri Blora dalam putusannya menolak pencatatan perkawinan beda agama, berdasarkan fenomena dua putusan pengadilan negeri tersebut maka penulis tertarik mengangkat tema penelitian yang berjudul “Studi Putusan Komparatif Pengadilan Negeri Magelang dengan Pengadilan Negeri Blora tentang Kontradiktif Pencatatan Perkawinan Beda Agama”.

2. Denah Penelitian

Adapun denah penelitian tersebut, sebagaimana dibawah ini :

Denah Penelitian



3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan denah kerangka pikir diatas maka fokus yang digali dan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut :

a. Putusan Pengadilan Negeri Magelang

- 1) Mengkaji kronologis pengajuan kasus pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Magelang.
- 2) Mengkaji pertimbangan dari putusan Pengadilan Negeri Magelang.

b. Putusan Pengadilan Negeri Blora

- 1) Mengkaji kronologis pengajuan kasus pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Blora.
- 2) Mengkaji pertimbangan hakim dari putusan Pengadilan Negeri Blora.

c. Studi Komparatif

- 1) Mengkaji terjadinya kontradiktif Putusan Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Blora.
- 2) Kajian Hukum Islam menyikapi terjadinya kontradiktif antara Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Blora dalam memutuskan perkara pencatatan perkawinan beda agama tersebut.

BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Isi Putusan Pengadilan Negeri Magelang

1. Posita (Duduk Perkara) Pengadilan Negeri Magelang

Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 4 Januari 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang dibawah register Nomor : 04/Pdt.P/2012/PN.MGL pada tanggal 09 Januari 2012 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon lahir di Magelang pada tanggal 30 Mei 1981 anak dari seorang Ibu Sulibah;

Bahwa saat ini Pemohon akan melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Yeni Aryono yang lahir di Magelang pada tanggal 9 Mei 1978 anak dari pasangan suami isteri Aryo Joko Soewito dengan Heni Srijatun;

Bahwa Pemohon akan segera melaksanakan perkawinan dan sudah mendaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Magelang untuk dilakukan perkawinan namun oleh karena Pemohon dan calon isterinya berbeda agama, dalam hal ini Pemohon beragama Islam dan calon isteri

Pemohon Katholik, maka Kantor Catatan Sipil Kota Magelang tidak bisa melaksanakan dan mencatat perkawinan tersebut dan Kantor Catatan Sipil Kota Magelang bisa melaksanakan dan mencatat perkawinan apabila ada Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Magelang yang memberikan ijin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama;

Bahwa atas akan dilaksanakannya perkawinan antara Pemohon Yudi Kristanto dengan Yeni Aryono yang berbeda agama dan akan dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil Kota Magelang, telah mendapat restu dari orang tua calon isteri dan orang tua calon isteri juga tidak keberatan;

Bahwa menurut Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang beda agama diharuskan ada penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tentang hal tersebut;

Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di kota Magelang, maka sepantasnyalah Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Magelang;

2. Petitum (Permohonan) Pengadilan Negeri Magelang

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas, kiranya permohonan Pemohon beralasan serta berdasarkan hukum yang selanjutnya Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk menerimanya yang selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- b. Memberikan ijin kepada Yudi Kristanto yang lahir di Magelang pada tanggal 30 Mei 1981 anak dari seorang Ibu Sulibah untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil Kota Magelang dengan Yeni Aryono yang lahir di Magelang pada tanggal 9 Mei 1978 anak dari pasangan suami isteri Heni Srijatun dan Aryo Joko Soewito;

- c. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang setelah salinan Penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk melaksanakan perkawinan antara Yudi Kristanto dan Yeni Aryono dan mencatat di dalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu;
- d. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan Permohonan ini kepada Pemohon;

3. Ratio Decidendi (Pertimbangan Hukum oleh Hakim) Pengadilan Negeri Magelang

Ratio Decidendi atau pertimbangan hakim adalah bagian dari putusan pengadilan Indonesia yang mempertimbangkan dasar hukum yang digunakan dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan hukum oleh hakim pada putusan Pengadilan Negeri Magelang, penulis paparkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat baik asli maupun berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti-bukti mana telah diberi bea meterai sebagaimana mestinya berupa:

- a. Surat Keterangan/Pengantar Nomor : 470/05/I-12/535 tertanggal 5 Januari 2012 atas nama Yudi Kristanto, yang dikeluarkan oleh Kepala

Kelurahan Jurangombo Utara, selanjutnya diberi tanda P-1;

- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan N.I.K 3371013005810001 atas nama Yudi Kristanto, yang berlaku hingga 30 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda P-2;
- c. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 188/DIS/2006 atas nama Yudi Kristanto tertanggal 19 April 2006, selanjutnya diberi tanda P-3;
- d. Foto copy Kartu Keluarga No. 3371012309110004 atas nama Kepala Keluarga Sulibah, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, tertanggal 23-09-2011, selanjutnya diberi tanda P-4;
- e. Surat Pernyataan tertanggal 4 Januari 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sulibah selaku orang tua Yudi Kristanto, selanjutnya diberi tanda P-5;
- f. Surat Pernyataan tertanggal 5 Januari 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Yudi Kristanto, selanjutnya diberi tanda P-6;
- g. Foto copy Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Yudi Kristanto, tertanggal 7 September 2011 yang ditandatangani dr. Erawati, dokter Puskesmas Magelang Selatan, selanjutnya diberi tanda P-7;
- h. Surat Keterangan Nomor : 017/2010/I/2012 tertanggal 05 Januari 2012 atas nama Yeni Aryono, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mertoyudan Heru Joko Suseno, S. Sos, selanjutnya diberi tanda P-8;
- i. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan N.I.K : 3308104905780002

atas nama Yeni Aryono, yang berlaku hingga 09-05-2015, selanjutnya diberi tanda P-9;

- j. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 5771/DSP/1988 atas nama Yeni Aryono tertanggal 10 Pebruari 1989, selanjutnya diberi tanda P-10;
- k. Foto copy Kartu Keluarga No. 3308102602075089 atas nama Kepala Keluarga Aryo Djoko Soewito, tertanggal 08-10-2011, selanjutnya diberi tanda P-11;
- l. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Aryo Djoko Soewito dan Sriyatun tertanggal 4 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda P-12;
- m. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Yeni Aryono tertanggal 5 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda P-13;
- n. Foto copy Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Yeni Aryono tertanggal 7 September 2012, yang ditandatangani oleh dr. Erawati, dokter Puskesmas Magelang Selatan, selanjutnya diberi tanda P-14;
- o. Surat Perkawinan atas nama Yudi Kristanto dan Florentina Yeni Aryono tertanggal 20 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Paroki St. IGNATIUS Magelang dan ditandatangani oleh Rama Paroki Franciscus Xaverius Krisno Handoyo Pr., selanjutnya diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan pula 4 (empat) orang saksi

yaitu saksi Boedijono Oerip, saksi Pitoyo, saksi Sulibah dan saksi Heni Srijatun, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dan keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1) Saksi Boedijono Oerip;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RW 05 Kelurahan Jurang Ombo Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, sekaligus Ketua Lingkungan Yohanes I warga Katholik, dan Pemohon adalah warga saksi;

Bahwa tugas saksi selaku Ketua Lingkungan warga Katholik antara lain adalah membina dan mengkoordinir warga untuk kegiatan-kegiatan di gereja termasuk diantaranya perkawinan;

Bahwa Pemohon yang beragama Islam pernah datang ke rumah saksi, namun waktunya saksi sudah tidak ingat lagi, dalam rangka melaporkan akan melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan beragama Katolik bernama Yeni Aryono;

Bahwa atas laporan Pemohon tersebut kemudian saksi mengeluarkan surat pengantar dari Lingkungan Yohanes I untuk diserahkan ke bagian sekretariat di gereja St. Ignatius, Magelang;

Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Yeni Aryono telah terlaksana di Gereja St. Ignatius Magelang, pada sekitar bulan Oktober tahun 2011, dimana dilangsungkan di hadapan Pastur Romo

FX. Krisno Handoyo, Pr dan sebagai saksi dari pernikahan tersebut adalah saksi sendiri dan Pak Kusrin, serta dihadiri oleh keluarga kedua mempelai;

Bahwa atas perkawinan tersebut kemudian pihak gereja mengeluarkan surat perkawinan (Testimonium Matrimoni);

2) Saksi Pitoyo;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena sering bertemu ketika Pemohon berkunjung ke rumah Yeni Aryono, anak dari Sdr. Aryo Joko Suwito yang tinggal satu lingkungan dengan saksi di Salakan, Kabupaten Magelang;

Bahwa pada bulan- bulan menjelang akhir tahun 2011, saksi dimintai bantuan oleh Sdr. Aryo Djoko Soewito menguruskan surat-surat untuk persyaratan perkawinan antara Pemohon dengan Yeni Aryono;

Bahwa surat-surat N1 sampai dengan N5 tersebut berhasil diurus oleh saksi;

Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Yeni Aryono telah berlangsung di gereja, kapan tepatnya saksi tidak ingat, akan tetapi saksi hadir pada selamatan sehari sebelum perkawinan di gereja tersebut dilaksanakan;

3) Saksi Sulibah;

Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon Yudi Kristanto;

Bahwa Pemohon adalah anak pertama saksi;

Bahwa Pemohon beragama Islam, dan telah melaksanakan perkawinan secara agama Katolik di Gereja St. Ignatius, Magelang, dengan seorang perempuan bernama Yeni Aryono, pada tanggal 20 Oktober 2011;

Bahwa perkawinan secara agama (dikenal dengan sebutan pemberkatan perkawinan) tersebut berlangsung lancar dengan dihadiri oleh keluarga kedua mempelai;

4) Saksi Heni Srijatun;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon sudah berpacaran dengan Yeni Aryono anak kedua saksi selama sebelas tahun, dan kini keduanya telah menikah secara Katolik di Gereja St. Ignatius, Magelang;

Bahwa perkawinan secara agama tersebut, atau dikenal sebagai pemberkatan pernikahan, dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2011 dengan dihadiri keluarga kedua mempelai, setelah sebelumnya mengikuti pelajaran perkawinan yang diselenggarakan oleh gereja selama 3 (tiga) hari;

Bahwa sejak awal saksi mengetahui bahwa Pemohon beragama Islam sementara anak saksi Yeni Aryono beragama Katolik, namun demikian sebagai orang tua dari anak-anak yang sudah dewasa saksi menganggap mereka bisa menentukan sikap dan memilih yang terbaik bagi diri mereka sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendapatkan keterangan yang lebih faktual, telah didengar pula Yeni Aryono dalam persidangan, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Yeni Aryono telah kenal lama dengan Pemohon, berpacaran selama sebelas tahun, dan kini telah menikah secara agama dengan Pemohon;

Bahwa yang bersangkutan beragama Katolik sedangkan Pemohon beragama Islam;

Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan di Gereja Katolik St. Ignatius, Magelang, pada tanggal 20 Oktober 2011, dengan direstui seluruh keluarga, di hadapan Pastur Romo FX. Krisno Handoyo, Pr;

Bahwa yang bersangkutan merasa yakin akan berbahagia dengan perkawinan beda agama ini, dan bertekad untuk saling menghargai dalam menjalankan agama masing-masing;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Yeni Aryono, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, keterangan saksi-saksi dan Pemohon serta Yeni Aryono, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Pemohon yang lahir di Magelang tanggal 30 Mei 1981 beralamat di Jagoan I RT 06 RW 05, Kelurahan Jurangombo Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, adalah seorang laki-laki dewasa yang beragama Islam;

Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik di Gereja Katolik St. Ignatius Magelang pada tanggal 20 Oktober 2011, dengan seorang perempuan dewasa beragama Katolik, yaitu Yeni Aryono, lahir di Magelang tanggal 9 Mei 1978;

Bahwa perkawinan tersebut direstui keluarga kedua mempelai;

Bahwa Pemohon dengan Yeni Aryono telah mantap untuk menjalani perkawinan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sepanjang hayat;

Menimbang, bahwa perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; Adapun tujuan dari Undang-Undang tersebut adalah sebagai unifikasi atau penyeragaman hukum perkawinan yang sebelumnya sangat beragam mengingat keberagaman masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, diatur mengenai penegasan peran keagamaan dari suatu perkawinan, dimana disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi yang beragama Islam pencatatan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi yang beragama selain Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil, sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang laki-laki beragama Islam yang hendak mencatatkan perkawinannya dengan seorang perempuan beragama Katolik;

Menimbang, bahwa Pasal 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat mencatatkan perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan; Dan selanjutnya di dalam penjelasan dari pasal tersebut telah ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama;

Menimbang, bahwa senafas dengan peraturan tersebut, yaitu termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang menyatakan bahwa adalah keliru apabila Pasal 60

Undang-Undang tentang Perkawinan ditunjuk oleh Kepala KUA dan Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk menolak perkawinan beda agama;

Bahwa benar perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi keadaan tersebut adalah merupakan suatu kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan sudah merupakan kebutuhan sosial yang harus dicarikan jalan keluarnya menurut hukum agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama; Sementara itu undang-undang tersebut juga tidak melarang secara tegas tentang perkawinan beda agama tersebut sehingga terjadilah kekosongan hukum;

Bahwa UUD 1945 Pasal 27 menentukan bahwa seluruh warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama, sedangkan Pasal 29 UUD 1945 mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di dalam Pasal 10 ayat (1), (2) dan Pasal 16 ayat (1) pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang berhak untuk menikah dan membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan yang

dilaksanakan atas kehendak bebas sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya pro dan kontra dari berbagai pihak, pernikahan antarumat beragama ini haruslah dapat diterima sebagai suatu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat; Dalam kehidupan bermasyarakat ini tidak dapat dipungkiri adanya praktek budaya yang dilakukan oleh masyarakat, tanpa sekat-sekat perbedaan agama ataupun kebiasaan- kebiasaan hidup; Praktek budaya tersebut termasuk diantaranya adalah pernikahan beda agama sebagai salah satu mekanisme masyarakat membangun sikap solidaritas dan rasa toleransi (NU Studies : Pergolakan Pemikiran Fundamentalisme Islam, A Baso, hal 469);

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perkawinan antarumat beragama yang dilakukan Pemohon dan akan dicatatkan ini merupakan suatu fenomena yang banyak terjadi dalam masyarakat Indonesia yang pluralistis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Yeni Aryono telah memenuhi persyaratan dan sungguh-sungguh dilakukan dengan tujuan yang baik bukan dengan tujuan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup

beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon patut dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

4. Amar Putusan Pengadilan Negeri Magelang

Berdasarkan posita, petitum dan pertimbangan hakim melalui fakta-fakta yang ada dalam persidangan, maka amar putusan perkara nomor : 04/pdt.P/2012/PN.MGL adalah sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Memberikan ijin kepada Yudi Kristanto yang lahir di Magelang pada tanggal 30 Mei 1981 anak dari seorang Ibu Sulibah untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil Kota Magelang dengan Yeni Aryono yang lahir di Magelang pada tanggal 9 Mei 1987 anak dari pasangan suami isteri Heni Srijatun dan Aryo Djoko Soewito;
- c. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, setelah salinan Penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya

untuk melaksanakan perkawinan antara Yudi Kristanto dengan Yeni Aryono dan mencatat di dalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu;

- d. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

B. Isi Putusan Pengadilan Blora

1. Posita (Duduk Perkara) Pengadilan Negeri Blora

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 17 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora tanggal 20 Maret 2017 dibawah Nomor Register Perkara : 71/Pdt.P/2017/PN.Bla yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon/ Neneng Oktora Budi Asri binti Bambang Marjono (Alm) telah menjalin hubungan saling cinta-mencintai dengan seorang Pria temannya sendiri bernama Yavet Arianto bin Markus Wartono (Alm). Mereka berdua sudah saling mengenal sejak tahun 1996 (waktu masih sekolah SMTA), sudah ada kecocokan dan saling pengertian karena sudah berpacaran sejak tahun 2004 s/d sekarang (\pm 13 tahun), sehingga mereka berdua setuju dan bersepakat untuk ditingkatkan ke jenjang perkawinan;

Bahwa oleh karena itu, maka persetujuan dan kesepakatan antara Pemohon dan teman Prianya bernama Yavet Arianto bin Markus Wartono (Alm)

tentang rencana perkawinan tersebut selanjutnya mereka mohonkan restu kepada orangtua/ keluarga masing- masing;

Bahwa atas penuturan Pemohon terhadap orangtuanya (Ibu Yayuk Budhi Rahayu) mengenai hubungan Pemohon dengan teman Prianya / bernama Yavet Arianto bin Markus Wartono (Alm) yang akan ditingkatkan ke jenjang perkawinan, telah mendapatkan restu secara lisan dari Ibu Yayuk Budhi Rahayu (Ibunda Pemohon) ; demikian pula dari Pihak teman Prianya / Sdr. Yavet Arianto bin Markus Wartono (Alm) juga telah mendapat restu dari keluarga (kakaknya) karena kedua orangtuanya telah meninggal dunia;

Bahwa berkenaan dengan hal sebagaimana tersebut pada point No 2 dan 3 di atas, terkait dengan rencana perkawinan Pemohon dengan teman Prianya/ Sdr. Yavet Arianto bin Markus Wartono (Alm) , maka pelaksanaan lamaran dari keluarga Sdr. Yavet Arianto direncanakan akan dilaksanakan setelah mendapat Putusan/ Penetapan Pengadilan Negeri Blora tentang Izin Perkawinan Beda Agamayaitu sesaat sebelum Upacara Perkawinan dilaksanakan ;

Bahwa mengenai Perkawinan dan/ atau Perkawinan Beda Agama, telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat menyatakan bahwa : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu ; Ayat (2) Tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan“;

- b. Petunjuk-petunjuk Mahkamah Agung Nomor : M.A/ Pemb./ 0807 / 1975 tanggal 20 Agustus 1975 Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP Nomor 1 Tahun 1974 ; Tersebut pada point No 6, yang menyatakan bahwa : “ Adalah wewenang Pengadilan Negeri sebagai peradilan umum untuk memeriksa : Mengenai perkara-perkara antara mereka yang tidak beragama Islam yang berbeda agamanya dan berlainan kewarganegaraannya ; Mengenai hal- hal yang tidak diatur dalam PP tersebut sekalipun terhadap mereka yang beragama Islam; Karena menurut UU Nomor 14 Tahun 1970, pengadilan dalam lingkungan peradilan umum lah yang memeriksa semua sengketa perdata dan dalam mengadili sengketa perdata mana yang menurut hukum yang berlaku masih diterapkan hukum perdata yang berlainan, kadang- kadang hukum adat hukum BW hukum antargolongan atau hukum perdata internasional ;
- c. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , Bab XIV Ketentuan Penutup Pasal 66 jo. Peraturan tentang Perkawinan Campuran (Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 Nomor 23-Stbl 1896 No 158, dir. Dandit, dengan Stbl 1901/348 , 1902/ 311 , 1907/ 205 , 1918/ 30 , 159, 160, dan 161, 1919/ 81, dan 816, 1931/ 168 jo 423) ; Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa : Perbedaan agama, bangsa atau asal itu sama sekali bukanlah menjadi halangan untuk perkawinan itu ;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab II mengenai Pencatatan Perkawinan , Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa “Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang- undangan mengenai pencatatan perkawinan”;
- e. KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek Buku I tentang Orang, Bab IV tentang Perkawinan , Pasal 26 menyatakan bahwa : “ Undang- undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan- hubungannya perdata “; Bagian VII tentang Bukti Bukti Adanya Perkawinan: Pasal 100 menyatakan bahwa: “ Adanya suatu perkawinan tak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan Akta Perlangsungan Perkawinan itu, yang telah dibukukan dalam Register Catatan Sipil, kecuali dalam hal- hal teratur dalam pasal- pasal berikut “;
- Bahwa dari uraian dan keterangan-keterangan sebagaimana telah diutarakan tersebut di atas , dapat disimpulkan sebagai berikut :

Hubungan Pemohon / Neneng Oktora Budi Asri binti Bambang Marjono (Alm) dengan teman Prianya / Yavet Arianto bin Markus Wartono (Alm) adalah didasarkan atas saling cinta mencintai, dan mereka berdua telah setuju/ sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan ;

Hubungan saling cinta – mencintai antara Pemohon / Neneng Oktora Budi Asri dengan teman Prianya / Yavet Arianto tersebut, apabila dilanjutkan ke jenjang perkawinan maka akan terjadi Perkawinan Beda Agama (Islam dan Kristen) yang terlebih dahulu harus memperoleh Putusan/ Penetapan dari Pengadilan Negeri Blora tentang Izin Perkawinan Beda Agama; Niat dan kesepakatan Pemohon/ Neneng Oktora Budi Asri dengan teman Prianya / Yavet Arianto telah mendapat restu secara lisan dari orangtua/ keluarga masing-masing sedangkan Lamaran Resmi dari Pihak keluarga Yavet Arianto menurut rencana akan dilaksanakan setelah memperoleh Putusan/ Penetapan dari Pengadilan Negeri Blora tentang Izin Perkawinan Beda Agama ;

2. Petitum (Permohonan) Pengadilan Negeri Blora

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas maka guna memenuhi salah satu persyaratan administratif untuk dapatnyadilangsungkanPerkawinan antara Pemohon/Neneng Oktora Budi Asri binti Bambang Marjono (Alm) dengan Yavet Arianto bin Markus Wartono(Alm) maka Pemohon memohon agar Hakim yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara/permohonan ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
- b. Menetapkan Memberikan Izin Perkawinan Beda Agama kepada Pemohon/ Neneng Oktora Budi Asri binti Bambang Marjono(Alm) dengan Yavet Arianto bin Markus Wartono (Alm) ;

- c. Memerintahkan untuk membukukan Perkawinan Beda Agama tersebut dalam Register Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Membebaskan biaya Perkara dan Biaya lain-lain dalam perkara ini kepada Pemohon sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku;

- 3. Ratio Decidendi (Pertimbangan Hukum oleh Hakim) Pengadilan Negeri Blora

Ratio Decidendi atau pertimbangan hakim adalah bagian dari putusan pengadilan Indonesia yang mempertimbangkan dasar hukum yang digunakan dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan hukum oleh hakim pada putusan Pengadilan Negeri Magelang, penulis paparkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada isi permohonan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Hukum Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Neneng Oktora Budi Asri, diberi tanda bukti P.1;
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yafet Arianto, diberi tanda bukti P.2 ;

- c. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3.682/Dis/1990 atas nama Neneng Oktora Budi Asri, diberi tanda bukti P.3 ;
- d. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 335/1985 atas nama Yafet Arianto, diberi tanda bukti P.4 ;
- e. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Yayuk Budhi Rahayu, diberi tanda bukti P.5 ;
- f. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Markus Wartono, diberi tanda bukti P.6 ;
- g. Fotocopy Penetapan Nomor : 156/Pdt.P/2010/PN.Ska, diberi tanda bukti P.7;
- h. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Bambang Marjono, diberi tanda bukti P.8 ;
- i. Fotocopy Surat Keterangan dari Gereja Bethel Indonesia, diberi tanda bukti P.9 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan fotocopy bukti-bukti surat (P.1 s/d P.9) tersebut diatas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P.8 yang merupakan fotocopy dari fotocopy dan fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Hukum Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksiyang telah disumpah sesuai dengan agamanya

masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Saksi Yayuk Budhi Rahayu

Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Pemohon Neneng Oktora Budi Asri;

Bahwa saksi mengetahui jika Para Pemohon datang ke Pengadilan karena

Para Pemohon ingin mengajukan permohonan ijin menikah beda agama;

Bahwa Pemohon Neneng Oktora Budi Asri beragama Islam sedangkan calon suaminya yang bernama Yafet Arianto beragama Kristen ;

Bahwa rencananya Para Pemohon akan menikah pada tanggal 8 Mei 2017 atau tanggal 10 Mei 2017 di Gereja GBI Arumdal, Kabupaten Blora;

Bahwa setahu saksi, setelah menikah baik Pemohon Neneng Oktora Budi Asri maupun Pemohon Yafet Arianto tetap memeluk agamanya masing-masing ;

Bahwa saksi setuju dengan rencana pernikahan Para Pemohon tersebut karena Para Pemohon saling mencintai hanya saksi merasa khawatir dengan rumah tangga mereka jika Para Pemohon berbeda agama;

Bahwa Pemohon Neneng Oktora Budi Asri adalah anak perempuan dari suami istri Bambang Marjono dan Yayuk Budi Rahayu dan Bambang Marjono telah meninggal pada tanggal 13 Februari 2011 di Kunden, Kabupaten Blora ;

2) Saksi Deborah Sri Rahayu

Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon Yafet Arianto ;

Bahwa saksi mengetahui jika Para Pemohon datang ke Pengadilan karena

Para Pemohon ingin mengajukan permohonan izin menikah beda agama;

Bahwa Pemohon Neneng Oktora Budi Asri beragama Islam sedangkan calon suaminya yang bernama Yafet Arianto beragama Kristen ;

Bahwa rencananya Para Pemohon akan menikah pada tanggal 8 Mei 2017 atau tanggal 10 Mei 2017 di Gereja GBI Arumdal, Kabupaten Blora;

Bahwa setahu saksi, setelah menikah baik Pemohon Neneng Oktora Budi Asri maupun Pemohon Yafet Arianto tetap memeluk agamanya masing-masing ;

Bahwa saksi setuju dengan rencana pernikahan Para Pemohon tersebut karena Para Pemohon saling mencintai;

Bahwa Pemohon Yafet Arianto adalah anak laki-laki dari suami istri Markus Wartono dan Ernest Suginah ;

Bahwa Markus Wartono telah meninggal pada tanggal 30 Oktober 2014 di Gresi, Kabupaten Blora dan Ernest Suginah telah meninggal pada tanggal 28 Januari 2003 ;

Bahwa setahu saksi, Pemohon Yafet Arianto pernah menanyakan rencana pernikahannya dengan Pemohon Neneng Oktora Budi Asri yang beda agama ke Kantor Catatan Sipil dan petugas Catatan Sipil mengatakan bahwa syarat pernikahan tersebut harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri ;

3) Saksi Yanto Pandiangan

Bahwa saksi adalah Pendeta di Gereja GBI Arumdal, Kabupaten Blora;

Bahwa saksi mengetahui jika Para Pemohon datang ke Pengadilan karena

Para Pemohon ingin mengajukan permohonan izin menikah beda agama;

Bahwa Pemohon Yafet Arianto beragama Kristen sedangkan calon istrinya yang bernama Neneng Oktora Budi Asri beragama Islam;

Bahwa rencananya Para Pemohon hendak melangsungkan perkawinan mereka di Gereja GBI Arumdalu, Kabupaten Blora ;

Bahwa pihak gereja membolehkan Para Pemohon untuk menikah di gereja tetapi jika Para Pemohon hendak menikah di gereja maka Pemohon Neneng Oktora Budi Asri harus melepaskan atribut yang menunjukkan jika calon pengantin beragama Islam ;

Bahwa jika calon pengantin tidak mau melepaskan atribut yang menunjukkan jika calon pengantin beragama Islam maka pernikahan dilangsungkan di salah satu rumah calon pengantin secara agama Kristen;

Bahwa pada prinsipnya didalam ajaran agama Kristen menyatakan perkawinan beda agama adalah dilarang ;

4) Saksi Drs. Widodo, M.si

Bahwa saksi adalah Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora ;

Bahwa saksi mengetahui jika Para Pemohon datang ke Pengadilan karena Para Pemohon ingin mengajukan permohonan izin menikah beda agama;

Bahwa Pemohon Yafet Arianto beragama Kristen sedangkan calon istrinya yang bernama Neneng Oktora Budi Asri beragama Islam ;

Bahwa mengenai perkawinan beda agama tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora akan mengeluarkan Akte Perkawinan jika ada penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Bahwa setahu saksi, pada tahun 2010 ada penetapan dari Pengadilan Negeri Blora mengenai ijin menikah beda agama ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Hukum Para Pemohon akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan dari Para Pemohon yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan ijin menikah beda agama ;

Bahwa Pemohon Neneng Oktora Budi Asri beragama Islam sedangkan Pemohon Yafet Arianto beragama Kristen ;

Bahwa Pemohon Yafet Arianto kenal lama dengan Pemohon Neneng Oktora Budi Asri sejak SMA yaitu sekitar 13 tahun dan karena Para Pemohon saling mencintai hingga akhirnya Para Pemohon memutuskan untuk menikah ;

Bahwa rencananya Para Pemohon akan menikah pada tanggal 8 Mei 2017 atau tanggal 10 Mei 2017 di Gereja GBI Arumdal, Kabupaten Blora;

Bahwa Pemohon Neneng Oktora Budi Asri setuju untuk menikah di gereja tetapi Pemohon Neneng Oktora Budi Asri tetap akan memakai jilbab pada waktu acara pernikahan di gereja tersebut sebab Pemohon Neneng Oktora Budi Asri berkeinginan baik sebelum menikah maupun setelah menikah

Para Pemohon tetap memeluk agamanya masing-masing yaitu Pemohon Neneng Oktora Budi Asri beragama Islam sedangkan Yafet Arianto beragama Kristen ;

Bahwa Pemohon Yafet Arianto pernah menanyakan pernikahan beda agama tersebut kepada Pendeta Yanto Pandiyangan dan Kantor Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon didalam permohonannya tersebut ingin mengajukan permohonan ijin menikah beda agama dimana Pemohon Neneng Oktora Budi Asri beragama Islam sedangkan Pemohon Yafet Arianto beragama Kristen ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.9 dan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi

Yayuk Budhi Rahayu, saksi Deborah Sri Rahayu, saksi Yanto Pandiangan dan saksi Drs. Widodo,M.Si.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Neneng Oktora Budi Asri, bukti surat P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yafet Arianto dan keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwa Para Pemohon berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Blora sehingga Pengadilan Negeri Blora yang berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, bukti surat P.2, bukti surat P.5, bukti surat P.6 dan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon Neneng Oktora Budi Asri beragama Islam sedangkan calon suaminya yang bernama Yafet Arianto beragama Kristen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan hanya

diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3.682/Dis/1990 atas nama Neneng Oktora Budi Asri, bukti surat P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 335/1985 atas nama Yafet Arianto, bukti surat P.5 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Yayuk Budhi Rahayu, bukti surat P.6 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Markus Wartono dan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon Neneng Oktora Budi Asri lahir pada tanggal 07 Oktober 1979 dan Pemohon Yafet Arianto lahir pada tanggal 25 Januari 1980 sehingga Para Pemohon telah mencapai batas umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 dan keterangan dari saksi Yayuk Budhi Rahayu bahwa Bambang Marjono yang merupakan ayah dari Pemohon Neneng Oktora Budi Asri telah meninggal pada tanggal 13 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Yayuk Budhi Rahayu dan saksi Deborah Sri Rahayu yang merupakan keluarga dari Para Pemohon bahwa Para Pemohon saling mencintai sehingga mereka ingin melangsungkan pernikahan dan rencana pernikahan mereka juga telah disetujui oleh keluarga dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 berupa surat keterangan dari Gereja Bethel Indonesia, keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi Yayuk Budhi Rahayu, saksi Deborah Sri Rahayu, saksi Yanto Pandiangan bahwa rencananya Para Pemohon hendak melangsungkan perkawinannya di Gereja GBI Arumdal, Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Widodo,M.Si yang merupakan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora menerangkan bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora akan mengeluarkan Akte Perkawinan untuk perkawinan beda agama tersebut jika Para Pemohon telah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri untuk ijin menikah beda agama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Neneng Oktora Budi Asri beragama Islam sedangkan Pemohon Yafet Arianto beragama Kristen maka Hakim akan mempertimbangkan sahnyanya perkawinan menurut agama Islam dan agama Kristen ;

Menimbang, bahwa didalam ajaran agama Islam yaitu didalam surat Al-Baqarah : 221 disebutkan bahwa seorang perempuan muslim tidak boleh

menikah dengan seorang laki-laki yang bukan muslim bahkan didalam Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam Pasal 44 juga disebutkan seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam sehingga berdasarkan hal tersebut maka ajaran Islam tidak membolehkan pernikahan beda agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yanto Pandiangan yang merupakan pendeta di Gereja GBI Arumdal, Kabupaten Blora menerangkan bahwa didalam ajaran agama Kristen juga tidak diperbolehkan pernikahan beda agama sehingga pihak Gereja GBI Arumdal membolehkan Para Pemohon untuk menikah di gereja jika Pemohon Neneng Oktora Budi Asri mau melepaskan atribut yang menunjukkan jika calon pengantin yaitu Pemohon Neneng Oktora Budi Asri beragama Islam ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan menyatakan jika Para Pemohon baik sebelum menikah maupun setelah menikah tetap berkeinginan memeluk agamanya masing-masing yaitu Pemohon Neneng Oktora Budi Asri tetap beragama Islam sedangkan Pemohon Yafet Arianto tetap beragama Kristen ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon menyatakan tetap ingin memeluk agamanya masing-masing yaitu Pemohon Neneng Oktora Budi Asri tetap beragama Islam dan Pemohon Yafet Arianto tetap beragama Kristen dan didalam ajaran agama Islam maupun agama Kristen juga tidak membolehkan pernikahan beda agama maka berdasarkan ketentuan Pasal 2

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut keinginan Para Pemohon yang ingin melangsungkan pernikahan beda agama tidak dapat dilakukan karena pernikahan beda agama dilarang menurut ajaran agama Para Pemohon sehingga permohonan Para Pemohon tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon yang ingin melangsungkan pernikahan beda agama tidak dapat dikabulkan maka permohonan Para Pemohon tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa atas bukti surat P.7 berupa Penetapan Nomor : 156/Pdt.P/2010/PN.Ska maka Hakim tidak akan mempertimbangkan bukti surat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ditolak maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

4. Amar Putusan Pengadilan Negeri Blora

Berdasarkan posita, petitum dan pertimbangan hakim melalui fakta-fakta yang ada dalam persidangan, maka amar putusan perkara Pengadilan Negeri Blora nomor : 71/pdt.P/2017/PN Bla adalah sebagai berikut :

- a. Menolak permohonan Para Pemohon;
- b. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Berdasarkan data hasil penelitian di atas, untuk memudahkan dalam menyimak laporan perbandingan berikut ini, peneliti buat dalam bentuk tabel ringkasan berikut :



Tabel 1
Perbandingan ringkasan kronologis pengajuan kasus pencatatan perkawinan beda agama antar pengadilan negeri Magelang dengan pengadilan negeri Blora.

Pengadilan Negeri Magelang	Pengadilan Negeri Blora
Yudi Kristanto, sebagai pemohon lahir di Magelang pada tanggal 30 Mei 1981 anak dari seorang ibu bernama Sulibah, pada saat itu pemohon ingin melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Yeni Aryono yang lahir di Magelang pada tanggal 9 Mei 1978 anak dari pasangan Aryon Joko Soewito dengan Heni Srijatun.	Neneng Oktora Budi Asri binti Bambang Marjono (Alm) telah menjalin hubungan saling cinta-mencintai dengan seorang Pria temannya sendiri bernama Yavet Arianto bin Markus Wartono (Alm). Mereka berdua sudah saling mengenal sejak tahun 1996 (waktu masih sekolah SMTA), sudah ada kecocokan dan saling pengertian karena sudah berpacaran sejak tahun 2004 s/d sekarang (\pm 13 tahun), sehingga mereka berdua setuju dan bersepakat untuk ditingkatkan ke jenjang perkawinan. maka persetujuan dan kesepakatan antara Pemohon dan teman Prianya bernama Yavet Arianto bin Markus Wartono (Alm) tentang rencana perkawinan tersebut selanjutnya mereka mohonkan restu kepada orangtua/ keluarga masing- masing;

<p>Pemohon akan segera melaksanakan perkawinan dan sudah mendaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Magelang untuk dilakukan perkawinan namun oleh karena Pemohon dan calon isterinya berbeda agama, dalam hal ini Pemohon beragama ISLAM dan calon isteri Pemohon beragama KATHOLIK, maka Kantor Catatan Sipil Kota Magelang tidak bisa melaksanakan dan mencatat perkawinan tersebut. Kantor Catatan Sipil Kota Magelang bisa melaksanakan dan mencatat perkawinan apabila ada Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Magelang yang memberikan ijin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama.</p>	<p>Terkait dengan rencana perkawinan Pemohon dengan teman Prianya/ Sdr. Yavet Arianto bin Markus Wartono (Alm) , maka pelaksanaan lamaran dari keluarga Sdr. Yavet Arianto direncanakan akan dilaksanakan setelah mendapat Putusan/ Penetapan Pengadilan Negeri Blora tentang Izin Perkawinan Beda Agama yaitu sesaat sebelum Upacara Perkawinan dilaksanakan.</p>
<p>Ibu kandung pemohon, Sulibah Menerangkan Bahwa Pemohon adalah anak pertama saksi, beragama Islam, dan telah melaksanakan perkawinan secara agama Katolik di Gereja St. Ignatius, Magelang, dengan seorang perempuan bernama Yeni Aryono, pada tanggal 20 Oktober 2011; Perkawinan secara agama (dikenal dengan sebutan pemberkatan perkawinan) tersebut berlangsung lancar dengan dihadiri oleh keluarga kedua mempelai.</p> <p>Heni Srijatun, ibunda Yeni Aryono menerangkan Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon sudah berpacaran dengan Yeni Aryono selama sebelas tahun, dan kini keduanya telah menikah secara Katolik di Gereja St. Ignatius, Magelang; perkawinan secara agama tersebut, atau dikenal sebagai pemberkatan pernikahan, dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober 2011 dengan dihadiri keluarga kedua mempelai, setelah sebelumnya mengikuti pelajaran perkawinan yang diselenggarakan oleh gereja selama 3 (tiga) hari.</p> <p>Sejak awal saksi mengetahui bahwa Pemohon beragama Islam sementara anak saksi Yeni Aryono beragama Katolik, namun demikian sebagai orang tua dari anak-anak yang sudah dewasa, saksi menganggap mereka bisa menentukan sikap dan memilih yang terbaik bagi diri mereka sendiri.</p>	<p>Yayuk Budhi Rahayu Ibu kandung dari pemohon I mengetahui jika Para Pemohon datang ke Pengadilan karena Para Pemohon ingin mengajukan permohonan ijin menikah beda agama. Pemohon Neneng Oktora Budi Asri beragama Islam sedangkan calon suaminya yang bernama Yafet Arianto beragama Kristen. Rencananya Para Pemohon akan menikah pada tanggal 8 Mei 2017 atau tanggal 10 Mei 2017 di Gereja GBI Arumdal, Kabupaten Blora. Sepengetahuan saksi, setelah menikah baik Pemohon Neneng Oktora Budi Asri maupun Pemohon Yafet Arianto akan tetap memeluk agamanya masing-masing.</p>

Tabel 2
Ringkasan pertimbangan hakim antara pengadilan negeri Magelang dengan
Pengadilan Negeri Blora dalam memutuskan perkara pencatatan perkawinan beda
agama

Pengadilan Negeri Magelang	Pengadilan Negeri Blora
<p>Pertimbangan Yuridis</p> <p>Menimbang, bahwa perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang- Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; Adapun tujuan dari Undang- Undang tersebut adalah sebagai unifikasi atau penyeragaman hukum perkawinan yang sebelumnya sangat beragam mengingat keberagaman masyarakat Indonesia;</p> <p>Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, diatur mengenai penegasan peran keagamaan dari</p>	<p>Pertimbangan Yuridis</p> <p>Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa</p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, bukti surat P.2, bukti surat P.5, bukti surat P.6</p>

<p>suatu perkawinan, dimana disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;</p> <p>Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi yang beragama Islam pencatatan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi yang beragama selain Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil, sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Menimbang, bahwa pemohon adalah seorang laki-laki beragama Islam yang hendak mencatatkan perkawinannya dengan seorang perempuan beragama Katolik;</p> <p>Menimbang, bahwa Pasal 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat mencatatkan perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan; Dan selanjutnya di dalam penjelasan dari pasal tersebut telah ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama;</p> <p>Menimbang, bahwa senafas dengan peraturan tersebut, yaitu termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang menyatakan bahwa adalah keliru apabila Pasal 60 Undang-Undang tentang Perkawinan ditunjuk oleh Kepala KUA dan Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk menolak perkawinan beda agama; Bahwa benar perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi keadaan tersebut adalah merupakan suatu kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan sudah merupakan kebutuhan sosial yang harus dicarikan jalan keluarnya menurut hukum agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama; Sementara itu undang-undang tersebut juga tidak melarang secara tegas</p>	<p>dan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon Neneng Oktora Budi Asri beragama Islam sedangkan calon suaminya yang bernama Yafet Arianto beragama Kristen ;</p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai ;</p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun ;</p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa kutipan akta kelahiran nomor : 3.682/Dis/1990 atas nama Neneng Oktora Budi Asri, bukti surat P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 335/1985 atas nama Yafet Arianto, bukti surat P.5 berupa kartu keluarga atas nama kepala keluarga Yayuk Budhi Rahayu, bukti surat P.6 berupa kartu keluarga atas nama kepala keluarga Markus Wartono dan keterangan saksi-saksi bahwa pemohon Neneng Oktora Budi Asri lahir pada tanggal 07 Oktober 1979 dan pemohon Yafet Arianto lahir pada tanggal 25 Januari 1980 sehingga para pemohon telah mencapai batas umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;</p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.</p>
--	---

<p>tentang perkawinan beda agama tersebut sehingga terjadilah kekosongan hukum; Bahwa UUD 1945 Pasal 27 menentukan bahwa seluruh warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama, sedangkan Pasal 29 UUD 1945 mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing;</p> <p>Menimbang, bahwa selain itu di dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di dalam Pasal 10 ayat (1), (2) dan Pasal 16 ayat (1) pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang berhak untuk menikah dan membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan yang dilangsungkan atas kehendak bebas sesuai dengan ketentuan undang-undang;</p>	
<p>Pertimbangan Non-Yuridis Menimbang, bahwa terlepas dari adanya pro dan kontra dari berbagai pihak, pernikahan antarumat beragama ini haruslah dapat diterima sebagai suatu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat; Dalam kehidupan bermasyarakat ini tidak dapat dipungkiri adanya praktek budaya yang dilakukan oleh masyarakat, tanpa sekat-sekat perbedaan agama ataupun kebiasaan-kebiasaan hidup; Praktek budaya tersebut termasuk diantaranya adalah pernikahan beda agama sebagai salah satu mekanisme masyarakat membangun sikap solidaritas dan rasa toleransi (NU Studies : Pergolakan Pemikiran Fundamentalisme Islam, A Baso, hal 469); Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perkawinan antarumat beragama yang dilakukan Pemohon dan akan dicatatkan ini merupakan suatu fenomena yang banyak terjadi dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik;</p> <p>Menimbang karena adanya rasa kasih sayang yang kuat untuk melaksanakan ikatan perkawinan dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.</p> <p>Menimbang adanya restu keluarga kedua mempelai.</p>	<p>Pertimbangan Non-Yuridis Menimbang, bahwa oleh karena pemohon Neneng Oktora Budi Asri beragama Islam sedangkan pemohon Yafet Arianto beragama Kristen maka hakim akan mempertimbangkan sahnyanya perkawinan menurut agama Islam dan agama Kristen ;</p> <p>Menimbang, bahwa didalam ajaran agama Islam yaitu didalam surat Al-Baqarah : 221 disebutkan bahwa seorang perempuan muslim tidak boleh menikah dengan seorang laki-laki yang bukan muslim bahkan didalam Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam Pasal 44 juga disebutkan seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam sehingga berdasarkan hal tersebut maka ajaran Islam tidak membolehkan pernikahan beda agama ;</p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yanto Pandiangan yang merupakan pendeta di Gereja GBI Arumdal, Kabupaten Blora menerangkan bahwa didalam ajaran agama Kristen juga tidak diperbolehkan pernikahan beda agama sehingga pihak Gereja GBI Arumdal membolehkan para pemohon untuk menikah di gereja jika pemohon Neneng Oktora Budi Asri mau melepaskan atribut yang menunjukkan jika calon pengantin yaitu pemohon Neneng Oktora Budi Asri beragama Islam ;</p>

	Menimbang, bahwa oleh karena para pemohon menyatakan tetap ingin memeluk agamanya masing-masing yaitu pemohon Neneng Oktora Budi Asri tetap beragama Islam dan pemohon Yafet Arianto tetap beragama Kristen dan didalam ajaran agama Islam maupun agama Kristen juga tidak membolehkan pernikahan beda agama maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut keinginan para pemohon yang ingin melangsungkan pernikahan beda agama tidak dapat dilakukan karena pernikahan beda agama dilarang menurut ajaran agama para pemohon.
--	---

Tabel 3
Kontradiktif putusan pengadilan negeri Magelang dengan pengadilan negeri Blora terhadap pencatatan perkawinan beda agama

Pengadilan Negeri Magelang	Pengadilan Negeri Blora
Putusan Pengadilan Negeri Magelang nomor : 04/pdt.P/2012/PN.MGL yang mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama, secara yuridis hakim telah berupaya menggali undang-undang yang berkaitan dengan perkawinan, yaitu UUD 1945, undang-undang perkawinan, undang-undang administrasi kependudukan dan menggunakan konsep Hak Asasi Manusia. Bahwa UUD 1945 Pasal 27 menentukan bahwa seluruh warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, tercakup di	Putusan Pengadilan Negeri Blora nomor : 71/pdt.P/2017/PN Bla yang menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Secara yuridis, hakim menggali aturan-aturan yang berkaitan dengan perkawinan diantaranya ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal

<p>dalamnya kesamaan hak asasi untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama, sedangkan Pasal 29 UUD 1945 mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing, selain itu di dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di dalam Pasal 10 ayat (1), (2) dan Pasal 16 ayat (1) pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang berhak untuk menikah dan membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan yang dilangsungkan atas kehendak bebas sesuai dengan ketentuan undang-undang. Setiap orang mempunyai hak kebebasan beragama dan beribadat sesuai keyakinan agamanya. Selanjutnya penjelasan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang pengaturan pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 2 ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan PP No.9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu pasal 2-9.</p>	<p>berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Beberapa literatur perkawinan beda agama diklasifikasikan sebagai larangan perkawinan. Perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum Islam tentang boleh-tidaknya orang Islam menikah dengan Ahli Kitab. Hampir semua ulama sepakat tentang keharaman (ketidakbolehan) perempuan muslimah dinikahi oleh Ahli kitab.</p>
---	---



BAB IV

ANALISIS PUTUSAN

A. Kronologis Pengajuan Kasus Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Blora

1. Kronologis di Pengadilan Negeri Magelang

Yudi Kristanto, sebagai pemohon lahir di Magelang pada tanggal 30 Mei 1981 anak dari seorang ibu bernama Sulibah, pada saat itu pemohon ingin melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Yeni Aryono yang lahir di Magelang pada tanggal 9 Mei 1978 anak dari pasangan Aryon Joko Soewito dengan Heni Srijatun.

Pemohon akan segera melaksanakan perkawinan dan sudah mendaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Magelang untuk dilakukan perkawinan namun oleh karena Pemohon dan calon isterinya berbeda agama, dalam hal ini Pemohon beragama Islam dan calon isteri Pemohon beragama Katholik, maka Kantor Catatan Sipil Kota Magelang tidak bisa melaksanakan dan mencatat perkawinan tersebut. Kantor Catatan Sipil Kota Magelang bisa melaksanakan dan mencatat perkawinan apabila ada Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Magelang yang memberikan ijin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

Boedijono Oerip, saksi selaku Ketua RW 05 Kelurahan Jurang Ombo Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, sekaligus Ketua Lingkungan Yohanes I warga Katholik, bertugas untuk membina dan mengkoordinir warga untuk kegiatan-kegiatan di gereja termasuk

diantaranya perkawinan, menjelaskan bahwa pemohon yang beragama Islam pernah datang ke rumahnya dalam rangka melapor akan melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan beragama Katolik bernama Yeni Aryono.

Bahwa atas laporan Pemohon tersebut kemudian saksi mengeluarkan surat pengantar dari Lingkungan Yohanes I untuk diserahkan ke bagian sekretariat di gereja St. Ignatius, Magelang.

Perkawinan antara Pemohon dengan Yeni Aryono telah terlaksana di Gereja St. Ignatius Magelang, pada sekitar bulan Oktober tahun 2011, dimana dilangsungkan di hadapan Pastur Romo FX. Krisno Handoyo, Pr dan sebagai saksi dari pernikahan tersebut adalah saksi sendiri dan Pak Kusrin, serta dihadiri oleh keluarga kedua mempelai. Bahwa atas perkawinan tersebut kemudian pihak gereja mengeluarkan surat perkawinan (Testimonium Matrimoni);

Pitoyo, seorang saksi lainnya menjelaskan bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena sering bertemu ketika Pemohon berkunjung ke rumah Yeni Aryono, anak dari Aryo Joko Suwito yang tinggal satu lingkungan dengan saksi di Salakan, Kabupaten Magelang. Bahwa pada bulan- bulan menjelang akhir tahun 2011, saksi dimintai bantuan oleh Aryo Djoko Soewito menguruskan surat-surat untuk persyaratan perkawinan antara Pemohon dengan Yeni Aryono;

Ibu kandung pemohon, Sulibah Menerangkan Bahwa Pemohon adalah anak pertama saksi, beragama Islam, dan telah melaksanakan

perkawinan secara agama Katolik di Gereja St. Ignatius, Magelang, dengan seorang perempuan bernama Yeni Aryono, pada tanggal 20 Oktober 2011; Perkawinan secara agama (dikenal dengan sebutan pemberkatan perkawinan) tersebut berlangsung lancar dengan dihadiri oleh keluarga kedua mempelai.

Heni Srijatun, ibunda Yeni Aryono menerangkan Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon sudah berpacaran dengan Yeni Aryono selama sebelas tahun, dan kini keduanya telah menikah secara Katolik di Gereja St. Ignatius, Magelang; perkawinan secara agama tersebut, atau dikenal sebagai pemberkatan pernikahan, dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2011 dengan dihadiri keluarga kedua mempelai, setelah sebelumnya mengikuti pelajaran perkawinan yang diselenggarakan oleh gereja selama 3 (tiga) hari.

Sejak awal saksi mengetahui bahwa Pemohon beragama Islam sementara anak saksi Yeni Aryono beragama Katolik, namun demikian sebagai orang tua dari anak-anak yang sudah dewasa, saksi menganggap mereka bisa menentukan sikap dan memilih yang terbaik bagi diri mereka sendiri.

Berdasarkan kronologis diatas, penulis mencermati bahwa kasus pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Magelang dilakukan pemohon yang bernama Yudi Kristanto beragamaan Islam, sedangkan calon isterinya Yeni Aryono beragama Katholik sesuai sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan khususnya pasal 35 huruf a, perkawinan beda agama dapat dicatatkan di kantor catatan sipil dengan cara memohon penetapan pengadilan negeri yang menjadi dasar untuk pencatatannya.

Undang-undang sebagaimana kaidah pada umumnya, berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga harus dilaksanakan atau ditegakkan. Undang-undang harus diketahui oleh umum, tersebar luas dan harus jelas. Kejelasan undang-undang sangatlah penting. Oleh karena itu, setiap undang-undang selalu dilengkapi dengan penjelasan yang dimuat dalam tambahan lembaran negara. Sekalipun nama dan maksudnya sebagai penjelasan, namun seringkali terjadi penjelasan tersebut tidak juga memberi kejelasan, karena hanya dinyatakan “cukup jelas”, padahal teks undang-undang tidak jelas dan masih memerlukan penjelasan. Mungkin saja pembentuk undang-undang bermaksud hendak memberi kebebasan yang lebih besar kepada hakim.⁴⁵ Dalam perspektif Pound dan Dworkin, hakim merupakan pengemban hukum praktis yang menjadi tulang punggung dalam kegiatan penalaran hukum.⁴⁶

Dalam pencermatan peneliti, UU perkawinan pasal 2 (2) mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini tertuang dalam pasal 2 PP nomor 9 tahun 1975 bagi yang beragama Islam pencatatannya dilakukan oleh

⁴⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif...*, h. 24.

⁴⁶ Sadiani, *Nikah Via Telepon, Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia...*, h.201

pegawai pencatat nikah di kantor urusan agama, sedangkan bagi mereka yang bukan beragama Islam dilakukan di kantor pencatatan sipil, termasuk perkawinan beda agama dengan syarat penetapan dari pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukumnya.

Dalam bukunya, Professor Satjipto Rahardjo membahas masalah kepastian hukum dengan menggunakan perspektif sosiologis dengan sangat menarik dan jelas. Berikut kutipan pendapatnya, Setiap ranah kehidupan memiliki semacam ikon masing-masing. Untuk ekonomi ikon tersebut adalah efisiensi, untuk kedokteran; mengawal hidup dan seterusnya. Ikon untuk hukum modern adalah kepastian hukum. Setiap orang akan melihat fungsi hukum modern sebagai menghasilkan kepastian hukum. Masyarakat terutama masyarakat modern, sangat membutuhkan adanya kepastian hukum dalam berbagai interaksi antara para anggotanya dan tugas itu diletakkan di pundak hukum.⁴⁷

Menurut hemat peneliti kronologis pengajuan kasus pencatatan perkawinan beda agama di pengadilan negeri magelang memiliki kepastian hukum yang sesuai dengan pasal 35 huruf a Undang-undang Administrasi kependudukan, sehingga hakim dengan kewenangan dan kreatifitasnya dapat memeriksa dan memutus perkara.

2. Kronologis di Pengadilan Negeri Blora

Neneng Oktora Budi Asri Binti Bambang Marjono
(Alm), Tempat/tanggal lahir : Blora/ 07 Oktober 1979, pekerjaan : Guru

⁴⁷Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban...*, h. 133-136.

GTT pada SMAN 1 Tunjungan, agama : Islam, alamat Jl. R.A. Kartini Gang 8 No. 11 RT 003/RW 001, Kelurahan Kunden, Kecamatan/Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, dan Yafet Arianto Bin Markus Wartono (Alm) Tempat/tanggal lahir : Blora/ 25 Januari 1980, pekerjaan : Guru GTT pada SMK Negeri 1 Blora, agama : Kristen, alamat Desa Gersi RT 002/Rw 002, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, selaku pemohon I dan II, dalam perkara ini Para Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya Drs. S. Teguh Wiyono ,SH,M.Hum Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Jejeruk No.2 Seso, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Maret 2017.

Neneng Oktora Budi Asri binti Bambang Marjono (Alm) telah menjalin hubungan saling cinta-mencintai dengan seorang Pria temannya sendiri bernama Yavet Arianto bin Markus Wartono (Alm). Mereka berdua sudah saling mengenal sejak tahun 1996 (waktu masih sekolah SMTA), sudah ada kecocokan dan saling pengertian karena sudah berpacaran sejak tahun 2004 s/d sekarang (\pm 13 tahun), sehingga mereka berdua setuju dan bersepakat untuk ditingkatkan ke jenjang perkawinan. maka persetujuan dan kesepakatan antara Pemohon dan teman Prianya bernama Yavet Arianto bin Markus Wartono (Alm) tentang rencana perkawinan tersebut selanjutnya mereka mohonkan restu kepada orangtua/ keluarga masing- masing;

Penuturan Pemohon terhadap orangtuanya (Ibu Yayuk Budhi Rahayu) mengenai hubungan Pemohon dengan teman Prianya / bernama Yavet Arianto bin Markus Wartono (Alm) yang akan ditingkatkan ke jenjang perkawinan, telah mendapatkan restu secara lisan dari Ibu Yayuk Budhi Rahayu (Ibunda Pemohon) ; demikian pula dari Pihak teman Prianya / Sdr. Yavet Arianto bin Markus Wartono (Alm) juga telah mendapat restu dari keluarga (kakaknya) karena kedua orangtuanya telah meninggal dunia;

Berkenaan dengan hal sebagaimana tersebut di atas, terkait dengan rencana perkawinan Pemohon dengan teman Prianya/ Sdr. Yavet Arianto bin Markus Wartono (Alm) , maka pelaksanaan lamaran dari keluarga Sdr. Yavet Arianto direncanakan akan dilaksanakan setelah mendapat Putusan/ Penetapan Pengadilan Negeri Blora tentang Izin Perkawinan Beda Agamayaitu sesaat sebelum Upacara Perkawinan dilaksanakan

Yayuk Budhi Rahayu ibu kandung dari pemohon I mengetahui jika Para Pemohon datang ke Pengadilan karena Para Pemohon ingin mengajukan permohonan ijin menikah beda agama. Pemohon Neneng Oktora Budi Asri beragama Islam sedangkan calon suaminya yang bernama Yafet Arianto beragama Kristen. Rencananya Para Pemohon akan menikah pada tanggal 8 Mei 2017 atau tanggal 10 Mei 2017 di Gereja GBI Arumdal, Kabupaten Blora. Sepengetahuan saksi, setelah menikah baik Pemohon Neneng Oktora Budi Asri maupun Pemohon Yafet Arianto akan tetap memeluk agamanya masing- masing.

Saksi setuju dengan rencana pernikahan Para Pemohon tersebut karena Para Pemohon saling mencintai hanya saksi memiliki kekhawatiran dengan rumah tangga mereka jika Para Pemohon berbeda agama.

Selaku kaka kandung, Deborah Sri Rahayu mengetahui jika Para Pemohon datang ke Pengadilan karena Para Pemohon ingin mengajukan permohonan ijin menikah beda agama, mengetahui pula bahwa pemohon Neneng Oktora Budi Asri beragama Islam sedangkan calon suaminya yang bernama Yafet Arianto beragama Kristen. Rencananya Para Pemohon akan menikah pada tanggal 8 Mei 2017 atau tanggal 10 Mei 2017 di Gereja GBI Arumdal, Kabupaten Blora. Setahu saksi, setelah menikah baik Pemohon Neneng Oktora Budi Asri maupun Pemohon Yafet Arianto akan tetap memeluk agamanya masing-masing. Saksi setuju dengan rencana pernikahan Para Pemohon tersebut karena Para Pemohon saling mencintai.

Pemohon Yafet Arianto adalah anak laki-laki dari suami istri Markus Wartono dan Ernest Suginah. Bahwa Markus Wartono telah meninggal pada tanggal 30 Oktober 2014 di Gresi, Kabupaten Blora dan Ernest Suginah telah meninggal pada tanggal 28 Januari 2003.

Yanto Pandiangan, Pendeta di Gereja GBI Arumdal, Kabupaten Blora; mengetahui jika para pemohon datang ke Pengadilan karena Para Pemohon ingin mengajukan permohonan ijin menikah beda agama. Bahwa Pemohon Yafet Arianto beragama Kristen sedangkan calon istrinya yang bernama Neneng Oktora Budi Asri beragama Islam. Rencananya Para

Pemohon hendak melangsungkan perkawinan mereka di Gereja GBI Arumdalu, Kabupaten Blora, pihak gereja membolehkan Para Pemohon untuk menikah di gereja tetapi jika Para Pemohon hendak menikah di gereja maka Pemohon Neneng Oktora Budi Asri harus melepaskan atribut yang menunjukkan jika calon pengantin beragama Islam, namun jika calon pengantin tidak mau melepaskan atribut yang menunjukkan jika calon pengantin beragama Islam maka pernikahan dilangsungkan di salah satu rumah calon pengantin secara agama Kristen. Ajaran agama Kristen pada prinsipnya menyatakan perkawinan beda agama adalah dilarang.

Menurut hemat peneliti, sebagai negara yang besar, Indonesia mempunyai beragam etnis, suku, bangsa, budaya serta agama. Konstitusi menjamin setiap pemeluk agama bebas menjalankan dan mengamalkan agamanya masing-masing dengan seluas-luasnya. Setiap agama mengajarkan kebaikan kepada pemeluknya, meskipun prinsip-prinsip dasarnya berbeda-beda. Kebaikan yang diajarkan agama mempunyai dimensi yang universal, sehingga antara pemeluk agama diharuskan untuk mengamalkan ajaran agamanya agar tercipta keharmonisan antar umat beragama.

Keharmonisan antar umat beragama akan melahirkan nilai-nilai positif tersendiri bagi masyarakat, namun juga terkadang dapat menimbulkan permasalahan tersendiri, sebagai contoh adalah ketika dua insan manusia yang berbeda jenis kelamin dan saling menyayangi, saling mengasihi, mereka menghendaki ikatan suci yaitu sebuah perkawinan,

sementara agama mereka berbeda dan masing-masing dari mereka tetap berprinsip teguh pada keyakinan agamanya masing-masing.

Kasus pencatatan perkawinan beda agama di pengadilan negeri Blora dilakukan oleh pemohon Neneng Oktora Budi Asri beragamakan Islam dan calon suaminya Yafet Arianto yang beragamakan kristen. Penulis mencermati bahwa pemohon dalam kasus ini ialah seorang perempuan beragamakan Islam yang ingin melaksanakan perkawinan beda agama dengan laki-laki beragamakan Kristen, berbeda dengan kronologis dengan kasus pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Magelang. Setiap undang-undang bersifat statis dan tidak dapat mengikuti perkembangan kemasyarakatan, sehingga menimbulkan ruang kosong yang perlu diisi. Tugas mengisi ruang kosong itulah, dibebankan kepada para hakim dengan melakukan penemuan hukum melalui metode interpretasi atau konstruksi dengan syarat bahwa dalam menjalankan tugasnya tersebut, para hakim tidak boleh bersikap sewenang-wenang. Melihat kronologis pengajuan kasus di pengadilan negeri Blora, Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan. Jika peraturan perundang-undangan ternyata tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain

seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.⁴⁸

B. Latar Belakang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Blora tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama

Undang-undang sebagaimana kaidah pada umumnya, berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga harus dilaksanakan atau ditegakkan. Undang-undang harus diketahui oleh umum, tersebar luas dan harus jelas. Kejelasan undang-undang sangatlah penting. Oleh karena tu, setiap undang-undang selalu dilengkapi dengan penjelasan yang dimuat dalam tambahan lembaran negara. Sekalipun nama dan maksudnya sebagai penjelasan, namun seringkali terjadi penjelasan tersebut tidak juga memberi kejelasan, karena hanya dinyatakan “cukup jelas”, padahal teks undang-undang tidak jelas dan masih memerlukan penjelasan. Mungkin saja pembentuk undang-undang bermaksud hendak memberi kebebasan yang lebih besar kepada hakim.⁴⁹

Kegiatan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu peraturan perundang-undangan secara tuntas dan jelas. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan mempunyai kemampuan yang terbatas, sehingga undang-undang yang dibuat tidaklah lengkap dan tidak sempurna untuk mencakup keseluruhan kegiatan kehidupannya. Untuk itu, tidak ada peraturan

⁴⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif...*, h. 25.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 24.

perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya atau yang jelas sejasasnya.

Menurut peneliti, tidak ada yang sempurna di dunia ini termasuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut Utrecht, apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasar inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal ini hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya.⁵⁰ Inisiatif hakim sangat diperlukan untuk menggali lebih dalam suatu problematika hukum, dikarenakan kerja akal manusia sangat penting dalam berijtihad. Sebagaimana diungkapkan Wahbah Zuhaily, ijtihad merupakan usaha sungguh-sungguh dari seorang ahli hukum dalam mencari tahu tentang hukum-hukum syara.⁵¹

Dalam keputusannya, tidak dapat disimpulkan sepenuhnya, bahwa apa yang diputuskan oleh hakim sudah sepenuhnya memenuhi tujuan kepastian dan keadilan. Hukum juga tidak bisa diidentikkan dengan keadilan, sebab hukum itu sebagai sarana sedangkan keadilan sebagai tujuan. Paund menyatakan, bahwa hukum sebagai alat untuk pembaruan masyarakat (*a tool of social engineering*), sedangkan mochtar menyebut hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat. Kalau demikian, berarti hukum adalah media untuk mendekati keadilan kalau tidak dapat

⁵⁰ *Ibid.*, h.22.

⁵¹ Ali Sodiqin, Dkk, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia...*, h. 85.

dikatakan sebagai media untuk mencapai keadilan. Dengan demikian, tidak mungkin diperselisihkan antara sarana atau alat dengan tujuan.⁵²

Negara hukum Indonesia menghendaki menegakkan hukum dan keadilan, sehingga kepastian hukum dan keadilan harus menjadi produk putusan hakim.⁵³ Pengadilan yang sehari-harinya bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara dari berbagai kasus yang diajukan dan tidak boleh menolak untuk mengadili perkara tersebut. Dalam kondisi ini, hakim harus menerapkan hukum dan keadilan. Hakim menerapkan dua macam aturan, yaitu : pertama hukum formal, ketentuan yang mengatur tata cara memeriksa dan mengadili suatu perkara. Dalam perkara perdata, hakim wajib mematuhi ketentuan hukum acara perdata yang ada dalam HIR/R.Bg. dan ketentuan hukum acara lainnya, sebab dalam menjalankan hukum acara, yakni dalam rangka mewujudkan keadilan prosedural. Keadilan prosedural penting untuk menjaga kepastian hukum. dalam kepastian hukum, maka keadilan akan terjamin. Misalnya mendengar kedua belah pihak di persidangan sesuai asas *audi et alteram partem*, memberikan hak seluas-luasnya kepada kedua pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya secara berimbang. Kedua, hukum materil, hukum yang mengatur akibat hukum dari suatu hubungan hukum atau peristiwa hukum. Hukum materil dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan substansial, baik tertulis maupun yang tidak tertulis yang bersumber dari kesadaran hukum masyarakat. Hakim dalam

⁵²Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta : Kencana, 2015, h. 133.

⁵³ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta: Kencana, 2012, h. 211.

menerapkan hukum materil dibekali pengetahuan ilmu hukum seperti interpretasi, argumentasi analogi, *a contrario* dan penghalusan hukum, teori-teori hukum dan filsafat hukum. Hakim tidak boleh gegabah menyimpangi ketentuan hukum formal meskipun dengan alasan demi keadilan, sebab keadilan sangat relatif sifatnya.⁵⁴ Putusan yang mendekati keadilan tentu bukan putusan yang penalaran hukumnya hanya menempatkan hakim sebagai mulut atau corong undang-undang. Kita dapat menilai putusan yang berkualitas dengan argumentasinya dapat memulihkan kepercayaan masyarakat. Hakimnya tidak hanya membaca teks, tetapi berusaha menembus apa yang ada di balik teks, berdialog dengan konteks seraya melibatkan kepekaan nuraninya.⁵⁵

Seorang hakim dalam mengadili suatu perkara lebih mengutamakan fakta atau peristiwa yang terjadi, fakta konkret berupa fakta hukum yang menentukan pada putusan Pengadilan Negeri Magelang nomor : 04/pdt.P/2012/PN.MGL dan putusan Pengadilan Negeri Blora nomor : 71/pdt.P/2017/PN. Blr adalah sebagai berikut :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Magelang, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Yeni Aryono telah terlaksana di Gereja St. Ignatius Magelang, pada sekitar bulan Oktober tahun 2011, dimana dilangsungkan di hadapan Pastur Romo FX. Krisno Handoyo, Pr dan sebagai saksi dari pernikahan tersebut adalah saksi sendiri dan Pak Kusrin, serta dihadiri oleh keluarga kedua mempelai;

⁵⁴Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim...*, h. 136

⁵⁵*Ibid.*, h. 137.

- b. Putusan Pengadilan Negeri Magelang , bahwa yang bersangkutan merasa yakin akan berbahagia dengan perkawinan beda agama ini, dan bertekad untuk saling menghargai dalam menjalankan agama masing-masing;
- c. Putusan Pengadilan Negeri Blora, Bahwa Pemohon Yafet Arianto kenal lama dengan Pemohon Neneng Oktora Budi Asri sejak SMA yaitu sekitar 13 tahun dan karena Para Pemohon saling mencintai hingga akhirnya Para Pemohon memutuskan untuk menikah ;
- d. Putusan Pengadilan Negeri Blora, Bahwa rencananya Para Pemohon akan menikah pada tanggal 8 Mei 2017 atau tanggal 10 Mei 2017 di Gereja GBI Arumdalu, Kabupaten Blora;
- e. Putusan Pengadilan Negeri Blora , Bahwa Pemohon Neneng Oktora Budi Asri setuju untuk menikah di gereja tetapi Pemohon Neneng Oktora Budi Asri tetap akan memakai jilbab pada waktu acara pernikahan di gereja tersebut sebab Pemohon Neneng Oktora Budi Asri berkeinginan baik sebelum menikah maupun setelah menikah Para Pemohon tetap memeluk agamanya masing-masing yaitu Pemohon Neneng Oktora Budi Asri beragama Islam sedangkan Yafet Arianto beragama Kristen ;
- f. Putusan Pengadilan Negeri Blora , Bahwa pihak gereja membolehkan Para Pemohon untuk menikah di gereja tetapi jika Para Pemohon hendak menikah di gereja maka Pemohon Neneng Oktora Budi Asri harus melepaskan atribut yang menunjukkan jika calon pengantin beragama Islam;

- g. Putusan Pengadilan Negeri Blora , Bahwa pada prinsipnya didalam ajaran agama Kristen menyatakan perkawinan beda agama adalah dilarang.

Berdasarkan fakta hukum di atas, penulis mencermati ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusannya, yaitu pertimbangan, yuridis, non yuridis, dan filosofis. Lebih lanjut penulis uraikan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Yuridis Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Blora

Menurut peneliti, undang-undang hanya sebagai salah satu bagian dari unsur peraturan perundang-undangan dan hukum substansi yang mencakupi aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Selain unsur substansi hukum masih ada lagi unsur struktur hukum dan unsur budaya hukum.⁵⁶ Kaitan keberlakuan hukum secara yuridis dalam menetapkan putusan hukum yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Magelang nomor : 04/pdt.P/2012/PN.MGL dan putusan Pengadilan Negeri Blora nomor : 71/pdt.P/2017/PN. Bla yaitu sebagai berikut :

- 1) Undang- Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; (PN Magelang dan PN Blora)
- 2) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, diatur mengenai penegasan peran keagamaan dari suatu perkawinan, dimana disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut

⁵⁶ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta; PT RajaGrafindo Prenada, 2012, h.342.

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya; (PN Magelang dan PN Blora)

- 3) Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi yang beragama Islam pencatatan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi yang beragama selain Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil, sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (PN Magelang)
- 4) Pasal 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat mencatatkan perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan; Dan selanjutnya di dalam penjelasan dari pasal tersebut telah ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama; (PN Magelang)
- 5) Putusan Mahkamah Agung RI No. 1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang menyatakan bahwa adalah keliru apabila Pasal 60 Undang-Undang tentang Perkawinan ditunjuk oleh Kepala KUA dan Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk menolak perkawinan beda agama; Bahwa benar perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974

tentang Perkawinan, akan tetapi keadaan tersebut adalah merupakan suatu kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan sudah merupakan kebutuhan sosial yang harus dicarikan jalan keluarnya menurut hukum agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama; Sementara itu undang-undang tersebut juga tidak melarang secara tegas tentang perkawinan beda agama tersebut sehingga terjadilah kekosongan hukum; (PN Magelang)

- 6) UUD 1945 Pasal 27 menentukan bahwa seluruh warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama. (PN Magelang)
- 7) Pasal 29 UUD 1945 mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing; (PN Magelang)
- 8) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di dalam Pasal 10 ayat (1), (2) dan Pasal 16 ayat (1) pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang berhak untuk menikah dan membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan yang dilangsungkan atas kehendak bebas sesuai dengan ketentuan undang-undang; (PN Magelang)
- 9) Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai; (PN Blora)

10) Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun ; (PN Blora)

Secara Yuridis, kedua putusan ini memiliki keabsahan adanya sumber hukum dalam menjalankan putusan, dalam pasal 25 ayat 1 tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang tertulis sebagai berikut “segala putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Adanya pasal-pasal yang telah disebutkan diatas menunjukan bahwa kedua putusan ini mempunyai validitas hukum yang memiliki kekuatan hukum.

Putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat diganggu gugat, putusan yang mempunyai kekuatan pastinya akan bersifat mengikat, sehingga perkara yang diputuskan oleh hakim dianggap benar dan para pihak-pihak yang berperkara wajib untuk memenuhi isi putusan tersebut.

2. Pertimbangan Non-Yuridis Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Blora

Berdasarkan pencermatan peneliti berkaitan dengan pertimbangan hakim secara yuridis, pertimbangan non yuridis pun dapat mempengaruhi

aspek yuridis yang mencakup dalam aspek psikologis dan sosiologis. Hal ini juga termasuk dalam penetapan putusan Pengadilan Negeri Magelang nomor : 04/pdt.P/2012/PN.MGL dan putusan Pengadilan Negeri Blora nomor : 71/pdt.P/2017/PN. Bla yaitu sebagai berikut :

- 1) Adanya pro dan kontra dari berbagai pihak, pernikahan antarumat beragama ini haruslah dapat diterima sebagai suatu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat; Dalam kehidupan bermasyarakat ini tidak dapat dipungkiri adanya praktek budaya yang dilakukan oleh masyarakat, tanpa sekat-sekat perbedaan agama ataupun kebiasaan-kebiasaan hidup; Praktek budaya tersebut termasuk diantaranya adalah pernikahan beda agama sebagai salah satu mekanisme masyarakat membangun sikap solidaritas dan rasa toleransi (NU Studies : Pergolakan Pemikiran Fundamentalisme Islam, A Baso, hal 469); (sosiologis)
- 2) Rasa kasih sayang yang kuat untuk melaksanakan ikatan perkawinan dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. (psikologis)
- 3) Para pemohon menyatakan tetap ingin memeluk agamanya masing-masing yaitu pemohon Neneng Oktora Budi Asri tetap beragama Islam dan pemohon Yafet Arianto tetap beragama Kristen. (psikologis)
- 4) Adanya restu keluarga kedua mempelai. (psikologis dan sosiologis)

Berdasarkan analisis peneliti di atas, penulis mencermati bahwa latar belakang pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Magelang nomor : 04/pdt.P/2012/PN.MGL dan putusan Pengadilan Negeri Blora nomor : 71/pdt.P/2017/PN. Bla mencakup beberapa pertimbangan yaitu pertimbangan filosofis, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis yang meliputi aspek psikologis dan sosiologis.

3. Pertimbangan filosofis Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Blora

Menurut peneliti, pertimbangan filosofis dalam konteks filsafat hukum adalah (hasil) pemikiran yang metodis sistematis dan radikal mengenai hakikat dan hal-hal fundamental dan marginal dari hukum dalam segala aspek. Kaitan filsafat hukum secara filosofis dalam menetapkan putusan hukum yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Magelang nomor : 04/pdt.P/2012/PN.MGL dan putusan Pengadilan Negeri Blora nomor : 71/pdt.P/2017/PN. Bla yaitu :

- 1) Bolehnya menikahi wanita ahlu kitab sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 5. (PN Magelang)
- 2) Adanya rasa kasih sayang yang kuat sehingga menganggap agama bukanlah pemisah antara kedua pasangan. (PN Magelang)
- 3) Larangan menikahi laki-laki non muslim sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 221. (PN Blora)
- 4) Ajaran dan nilai-nilai setiap agama melarang perkawinan beda agama. (PN Blora)

- 5) Kaidah fiqhiyah yang artinya : “menolak kemudharatan lebih utama daripada mengharap kemaslahatan”. (PN Blora)

C. Analisis Terhadap Kontradiktif putusan antar Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Blora

Menurut peneliti, pertimbangan hukum oleh hakim dimaksudkan agar hakim dalam menjalankan fungsi dan kewenangan mengadili dapat menjatuhkan putusan yang mengandung rasa keadilan masyarakat, hakim harus dapat menangkap isyarat perubahan dan pertumbuhan kesadaran hukum masyarakat. Tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat dan hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam perspektif utilitarianisme, kemanfaatan adalah tujuan utama dari hukum dan kemanfaatan dalam konteks ini dimaknai sebagai kebahagiaan atau kesenangan (*happiness*). Sehingga yang ditekankan bukanlah adil atau tidaknya suatu hukum, melainkan sampai sejauh mana hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka hukum harus mencapai empat tujuan, yaitu memberi sumber nafkah hidup (*subsistence*), kecukupan (*abundance*), keamanan (*security*), dan kesetaraan (*equality*).⁵⁷ Hakim mesti dibebaskan dari keterikatan sebagai juru bicara undang-undang. Oleh karena itu, hakim mesti bebas dan merdeka dalam hal menafsir rumusan undang-undang dengan berbagai metodologi interpretasi yang diajarkan oleh doktrin ilmu hukum,

⁵⁷ Atif Latipulhayat, *Khazanah Jeremy Bentham*, Bandung: Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, volume Nomor 2 Tahun 2015.

mencari, menggali, dan merumuskan kaidah-kaidah dan asas hukum di tengah perkembangan perubahan kesadaran hukum masyarakat sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan keadaan, serta berwenang melakukan “*contra legem*” apabila ketentuan suatu pasal undang-undang bertentangan dengan kepatutan, ketertiban umum, dan tidak sesuai dengan kenyataan dinamika kondisi serta keadaan yang berkembang dalam jiwa, perasaan, dan kesadaran masyarakat.⁵⁸

Berdasarkan pemaparan peneliti di atas, melalui pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan antara putusan Pengadilan Negeri Magelang nomor : 04/pdt.P/2012/PN.MGL dan putusan Pengadilan Negeri Blora nomor : 71/pdt.P/2017/PN. Bla, penulis menganalisis sebagai berikut :

1. Analisis Yuridis Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Blora

Dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, diatur mengenai penegasan peran keagamaan dari suatu perkawinan, dimana disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ketentuan dalam pasal ini memaksa setiap warga negara untuk mematuhi hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dalam bidang perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia. Segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara termasuk

⁵⁸ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta; Kencana, 2008, h. 31-32

dalam hal yang menyangkut urusan perkawinan harus taat dan tunduk serta tidak bertenangan atau melanggar peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan perkawinan dibentuk untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara dalam kaitannya dengan perkawinan.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 diartikan sebagai hubungan lahir bathin yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita yang diikat oleh tali pernikahan dan menjadikan status mereka sebagai suami istri. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hdiup bersama sebagai suami dan istri. Ikatan lahir tersebut merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata. Sedangkan sebagai iktan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya keauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami dan istri. Ikatan lahir bathin dalam sebuah perkawinan merupakan bentuk pernyataan tegas seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menurut penulis, dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai macam penafsiran, terutama bagi pasangan yang ingin melaksanakan perkawinan beda agama. Permasalahan tersebut adalah menyangkut keabsahan perkawinan yang

didasarkan pada agama dan kepercayaan kedua mempelai dan kewajiban administrasi oleh negara tentang perkawinannya sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Penafsiran terhadap pasal 2 untuk perkawinan dari pasangan yang berbeda agama yaitu : pertama, perkawinan beda gama dan kepercayaan boleh dan sah dilakukan; kedua, perkawinan beda agama dan kepercayaan boleh dilakukan namun tidak sah; ketiga, perkawinan beda agama dan kepercayaan tidak boleh dan tidak sah dilakukan. Karena perbedaan dalam penafsiran, pelaksanaannya menimbulkan berbagai penyelundupan hukum sebagai bentuk ketidakpatuhan hukum warga negara terhadap hukum yang berlaku, diantaranya seperti : pelaksanaan perkawinan dengan mengesampingkan hukum nasional, baik dengan melaksanakan perkawinan di luar negeri kemudian melakukan pendaftarannya di kantor pencatatan perkawinan di Indonesia, atau melaksanakan perkawinan secara adat yang biasanya tidak diikuti dengan pendaftaran. Pelaksanaan perkawinan dengan mengesampingkan hukum agama, yaitu dengan cara menundukkan diri pada hukum perkawinan dan kepercayaan salah satu pihak, ataupun berpindah agama dan kepercayaanannya sesaat sebelum melangsungkan perkawinan dan sesudahnya kembali pada agama dan kepercayaan semula.⁵⁹

Mengacu pada pasal ini, penulis mengamati bahwa putusan Pengadilan Negeri Magelang dengan mengabulkan permohonan

⁵⁹ Jaja S. Meliala, *Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Bandung: Nuansa Mulia, 2015, h. 48

pencatatan perkawinan beda agama belum menggapai terhadap norma atau nilai yang ada di dalam pasal tersebut, dalam pasal tersebut jelas berbunyi akan sah tidaknya sebuah perkawinan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, sehingga perkawinan beda agama tidak jelas menggunakan dan melaksanakan perkawinan sesuai agama dan kepercayaan diantara kedua agama. Bertolak belakang dengan putusan pengadilan negeri Blora yang menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

Penulis menilai bahwa hakim Pengadilan Negeri Magelang kurang maksimal menggali fakta dan hukum yang ada, sebab hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, pertama kali harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya. Jika dalam hukum tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan permasalahan suatu perkara, maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 pasal 10 ayat (1) tentang kekuasaan kehakiman menentukan “bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukum

dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 pasal 5 ayat (1) juga menjelaskan bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Kata “menggali” biasanya diartikan bahwa hukumnya sudah ada dalam peraturan perundang-undangan namun masih samar-samar, sulit untuk diterapkan sehingga untuk menemukan hukumnya harus berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga hakim dituntut agar lebih kreatif dalam memutuskan suatu perkara.

2. Analisis Non-Yuridis Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Blora

Sejatinya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan pancasila dan UUD 1945, agama menjadi landasan dan negara mempunyai kepentingan dalam hal perkawinan. Agama menjadi landasan bagi komunitas individu yang menjadi wadah kebersamaan pribadi-pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa serta turut bertanggung jawab terwujudnya kehendak tuhan Ynag Maha Esa untuk meneruskan dan menjamin keberlangsungan hidup manusia. Negara juga berperan memberikan pedoman untuk menjamin kepastian hukum kehidupan bersama dalam tali ikatan perkawinan. Secara khusus, negara berperan untuk memberikan perlindungan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan

sah yang merupakan wujud dan jaminan keberlangsungan hidup manusia. Perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spritual dan sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan undang-undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara.

Lebih lanjut peneliti mengamati, perkawinan dalam pasal 1 undang-undang perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kebahagiaan dan kekal dalam menjalani bahtera rumah tangga adalah impian setiap orang, kesamaan visi dan misi dalam suatu rumah tangga sangatlah penting untuk kesenjangan dan keharmonisan dalam sebuah hubungan, namun bagaimana itu bisa didapat jika dari prinsip fundamental tentang keyakinan dan kepercayaan saja sudah berbeda. bukan argumen yang tak berdasar, sudah banyak bukti perkawinan yang dilaksanakan dengan beda agama berujung kepada hal yang tidak diinginkan. Sederet pasangan selebritis seperti Lidy Kaundau dengan Jamal Mirdad, Tamara Bleszynski dengan Mike Lewis, Deddy Corbuzier dan Kalina Oktarani dan pasangan-pasangan lainnya menjadi pelajaran bersama bahwa kebanyakannya perkawinan beda agama tidak berakhir dengan baik, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur pada pasal 1 undang-undang perkawinan sulit untuk dicapai.

Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat menjadi yurisprudensi bagi hakim lainnya untuk waktu yang mendatang.⁶⁰ Secara teknis kebebasan hakim dibatasi oleh kehendak pihak-pihak yang bersangkutan, Pancasila, UUD, undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Dalam menemukan hukum,⁶¹ ditegaskan dalam pasal 28 undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.⁶²

Lebih lanjut peneliti mencermati, perkawinan beda agama sangat berpotensi melahirkan persoalan hukum di kemudian hari. Pertama, soal keabsahan perkawinan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri. Hak isteri terhadap nafkah dan harta bersama sepenuhnya tergantung kepada ada tidaknya perkawinan yang sah sebagai alas hukumnya. Begitupula dari perkawinan yang sah akan melahirkan anak-anak yang sah. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah mempunyai hubungan hukum hanya dengan ibunya. Dengan demikian segala hak anak terhadap bapaknya akan hilang dan tidak diakui oleh hukum negara. Hak pemeliharaan terhadap anak yang dimiliki orang tuanya, hanya akan dapat diperoleh apabila memiliki status perkawinan yang sah. Sebaliknya, perkawinan beda agama yang

⁶⁰ Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*, Jawa Timur; Nasa Media, 2010, h. 124

⁶¹ Menurut Teori Hukum Alam Socrates, hukum bertujuan akhir pada kebajikan dan keadilan, bahkan hukum dapat membentuk kearifan lokal dan nilai-nilai kebaikan dalam manusia. (Marwan Effendy, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta; Referensi, 2014, h.19)

⁶² *Ibid.*, h.127

telah memiliki bukti otentik berupa buku nikah, dapat diajukan pembatalan dengan alasan bahwa pernikahannya tidak sah. Karena tidak sesuai dengan ketentuan agama (Hukum Islam) sebagaimana diatur dalam pasal 40 huruf C Kompilasi Hukum Islam. Pembatalan nikah, walau tidak berlaku surut, tetapi akan menimbulkan problem kejiwaan yang besar bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan.

Kedua, Hak kewarisan antara suami isteri dan anak-anaknya. Perbedaan agama menggugurkan hak saling mewarisi. Bila persoalan kewarisan dilihat dari aspek keadilan, maka pelarangan kawin beda agama jelas lebih melindungi hak kewarisan masing-masing. Agama adalah persoalan keyakinan, konsekuensinya anak hanya akan seagama dengan salah satu dari agama kedua orangtuanya atau menganut agama selain dari kedua orangtuanya. Munul persoalan ketika anak yang seagama mendapat warisan, sementara saudara kandungnya yang tidak seagama tidak mendapat warisan.

Ketiga, pengadilan tempat menyelesaikan sengketa rumah tangga. Lembaga peradilan di Indonesia selain mengenal kewenangan absolut dengan kewenangan relatif, juga mengenal asas personalitas. Pengadilan agama berwenang terhadap pihak-pihak yang beragama Islam, sementara pengadilan negeri berwenang terhadap pihak-pihak yang non muslim. Sengketa kewenangan pengadilan mana yang harus

mengadili sangat mungkin terjadi, sehingga penyelesaian pokok perkara terlambat.

3. Analisis Filosofis Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Blora

Secara filosofis, putusan Pengadilan Negeri Magelang dan putusan Pengadilan Negeri Blora tentang pencatatan perkawinan beda agama melalui pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan terfokus pada perbedaan jenis kelamin dan agama para pemohon I. Berdasarkan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lebih lanjut perkawinan laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan saling melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 187 yang menjelaskan istri adalah pakaian suami, sebagaimana layaknya dengan suami juga pakaian untuk istri.

Lebih lanjut penulis mencermati fakta-fakta hukum dalam kedua putusan, bahwa putusan pengadilan negeri Magelang lebih mengedepankan aspek kebebasan sebagai wujud hak asasi manusia selama dalam batas yang tidak melanggar norma dan tidak melanggar hak asasi orang lain. Selain itu, dalam surat A-Maidah ayat 5 :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
 وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ
 عَمَلُهُ

وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya :

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi”.⁶³

Dikabulkannya permohonan pencatatan perkawinan beda agama di pengadilan negeri Magelang tidak lepas dari interpretasi pemahaman hakim terhadap penjelasan dalam surat ini. Berbeda halnya dengan putusan pengadilan Negeri Blora yang menolak untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Dalam doktrinnya setiap agama melarang untuk melaksanakan perkawinan beda agama bagi pemeluknya kecuali dengan syarat-syarat khusus yang harus diikuti. Pemohon dalam kasus ini berbeda dengan pemohon di pengadilan negeri Magelang, pemohon dalam putusan ini adalah

⁶³ Al-Maidah [5] : 5.

seorang perempuan Islam yang ingin melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki non muslim. Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 221 tegas melarang akan hal itu, sebagaimana berbunyi :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٰمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُعْجِبُكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا تُعْجَبُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ

وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.⁶⁴

Dijelaskan pula dalam fakta hukumnya bahwa kedua pasangan akan tetap pada keyakinan agama masing-masing, sehingga menurut penulis dikemudian hari akan menimbulkan kemudharatan yang berkelanjutan. Sebagaimana kaidah fiqih menerangkan :

جَلَبِ الْمَصَالِحِ وَدَفْعِ الْمَفَاسِدِ

Artinya :

⁶⁴ Al-Baqarah [2] : 221.

“Meraih yang maslahat dan menolak yang mafsadah”.⁶⁵

Maksud dari kaidah ini adalah jikalau berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan maka didahulukan menghilangkan kemudharatan, yaitu hakim berijtihad dengan menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama dalam putusan pengadilan negeri Blora.

D. Tinjauan Hukum Islam atas Terjadinya Kontradiktif putusan antar Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Blora

Menurut agama Islam, pada dasarnya menikahi wanita kitabiyah dibolehkan dengan beberapa syarat dan ketentuan, namun ketika zaman telah berubah dan kerurgian mengancam kehidupan umat Islam, Umar bn Khattab melarang laki-laki muslim menikahi ahli kitab dengan pertimbangan bahwa sikap dan sifat ahli kitab di zamannya telah berubah dan tujuan dibolehkannya menikahi ahli kitab tidak tercapai lagi, yaitu dengan menikahi wanita ahli kitab besar harapannya mereka dapat dibimbing untuk masuk Islam. Secara metodologi usul fikih, tindakan Umar ini disebut ijtihad *tatbiqi*. Ketika illat suatu nash tidak dijumpai lagi pada suatu objek hukum, maka hukum tersebut tidak dapat diterapkan pada objek hukum tersebut. Dalam kasus perkawinan ini, *illat* yang membolehkan lelaki muslim menikahi wanita ahli kitab ialah agar mereka dapat dibimbing masuk Islam. Namun hal itu tidak

⁶⁵ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta : Kencana, 2007, h. 6

dapat lagi diterapkan, atas dasar itulah Umar melarang perkawinan beda agama.

Dalam beberapa pembahasan istilah non muslim biasanya diungkapkan dengan menggunakan istilah “*kafir*”, jakamaknya “*kuffar*”. Secara terminologis pengertian *kafir* adalah orang-orang yang ingkar (menolak/tidak mengakui) terhadap kebenaran Islam dan keluar dari agama Islam. Ulama fikih membagi kafir kepada : kafir *harbi*, kafir *kitab*i, kafir *mu’ahid*, kafir *musta’min*, kafir *zinni*, dan kafir *riddah*. Kafir *harbi* adalah kaum kafir yang memusuhi Islam. Negara yang bermusuhan dengan negara Islam. Apabila kafir *harbi* berada dalam negara Islam, mereka harus diperlakukan lebih keras dibandingkan dengan orang-orang kafir *zinni*. Hal ini karena sifat khas mereka yang selalu membuat kerusakan di muka bumi. kafir *harbi* tidak berhak mendapat perlindungan dari pemerintahan Islam, kecuali jika mereka berada dan tunduk di bawah pemerintahan Islam.

Kafir *harbi* yang memasuki wilayah Islam dan menyatakan tunduk dan patuh terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara Islam, maka status orang tersebut berubah menjadi kafir *zinni*. Kafir *kitab*i adalah orang kafir yang memiliki kitab samawi, yaitu kitab suci yang diturunkan Allah. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 153.

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ ۖ فَقَدْ سَأَلُوا
 مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ
 بِظُلْمِهِمْ ۖ ثُمَّ أَخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ
 ذَلِكَ ۖ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا
 مُبِينًا

Artinya :

“Ahli Kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah Kitab dari langit. Maka sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata: "Perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata". Maka mereka disambar petir karena kezalimannya, dan mereka menyembah anak sapi, sesudah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata, lalu Kami maafkan (mereka) dari yang demikian. Dan telah Kami berikan kepada Musa. keterangan yang nyata”.⁶⁶

Ahli kitab memiliki ciri khas dibanding dengan jenis kafir lainnya, karena mereka pada dasarnya mengimani beberapa kepercayaan pokok yang dianut Islam, namun kepercayaan mereka tidak utuh, penuh cacat dan parsial. Mereka melakukan diskriminasi terhadap para rasul Allah dan kitab-kitab suci, terutama dengan penolakan terhadap nabi Muhammad SAW dan Al-Qur'an. Ulama fikih sepakat bahwa Yahudi dan Nasrani merupakan dua komunitas ahli kitab, jumhur ulama menolak selain Yahudi dan Nasrani itu dimasukkan dalam kategori ahli kitab. Muhammad Abduh dan Rasyid Rida berpendapat bahwa Majusi,

⁶⁶ An-Nisa [4] :153.

Hindu, Budha, Kong Hu Cu dan sabi'in termasuk dalam kategori ahli kitab dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki kitab suci dan dapat ditelusuri persambungan akidahnya dengan monoteisme.

Kafir *mu'ahid* adalah kafir *harbi* yang penguasanya telah menandatangani perjanjian damai dengan pemerintahan Islam. Mereka harus dilindungi hak dan kewajibannya, sepanjang mereka tidak melanggar perjanjian yang telah dibuat. Kafir *musta'min* adalah kafir yang bermukim sementara atau bertamu di wilayah kekuasaan pemerintahan Islam.

Kafir *zinni* adalah kafir yang berdamai dengan orang Islam, tinggal dan mematuhi seluruh hukum yang berlaku. Mereka bebas beraktifitas sepanjang tidak menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum. Kafir *riddah* adalah orang Islam yang menyatakan dirinya keluar dari agama Islam, baik dinyatakan ketika berada di negara Islam maupun berada di negara lain. Seorang muslim dinyatakan murtad apabila ia membuat pengakuan secara sadar dan bebas (tanpa tekanan dan paksaan) bahwa ia keluar dari Islam, atau ia meyakini keyakinan (agama) yang bertentangan dengan ajaran dasar akidah dan syariat Islam.

Ada dua kriteria non muslim dalam perkawinan, yang disebutkan dalam Al-Qur'an yaitu *musyrik* dan ahli kitab. *Musyrik* adalah pihak yang dilarang Al-Qur'an untuk dikawini oleh seorang muslim sebagaimana disebutkan dalam surah *Al-Baqarah* ayat 221 dan surah *Al-Mumtahanah* ayat 10. Menurut Ibnu Munzir, ayat yang melarang

perkawinan dengan pihak *musyrik* (*Al-Baqarah* ayat 221) adalah sebagai jawaban bagi IbnuAbi Murtasi al ganawi yang bermaksud untuk menikah dengan wanita *musyrik*.

Sebagaimana diketahui bahwa agama Nasrani pernah mengalami perubahan besar dalam doktrin teologinya dengan adanya dogma trinitas. Konsili Nikea tahun 325 M, dua abad lebih sebelum Rasulullah SAW lahir, sebagai pangkal lahirnya paham trinitas, terjadi dengan latar belakang persengketaan tentang pribadi Al-Masih. Dalam konsili yang dicampuri penguasa konstantine dengan memaksakan kehendak yang bertentangan dengan keesaan Tuhan, disertai dengan pembauran secara membabi buta terhadap pendapat tokoh agama, walaupun hal itu bertentangan dengan nash agama masehi. Dogma trinitas sudah ada dan dianut umat Nasrani di sekitar Rasulullah SAW. Begitupula dengan umat Yahudi sudah mengalami penyimpangan dari ajaran aslinya.

Imam Syafi'e menolak pendapat yang menyatakan bahwa hubungan antara surah *Al-Baqarah* ayat 221 dengan surah *Al-Maidah* ayat 5 adalah *nasikh mansukh*, beliau menyatakan bahwa kedua ayat tersebut tetap berlaku. Jumhur ulama berpendapat bahwa ahli kitab yang boleh dinikahi itu adalah perempuan Yahudi dan Perempuan Nasrani, hal ini bahkan kesepakatan para imam madzhab. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa ahlu kitab itu Yahudi dan Nasrani, sama saja antara yang berada dalam kekuasaan penguasa muslim atau tidak.⁶⁷

⁶⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, Jakarta : Robbani Press, 2000, h. 216

Pendapat Syafi'iyah yang *mu'tamad*⁶⁸ mensyaratkan ahli kitab yang boleh dinikahi memenuhi kriteria "*minqablikum*", artinya wanita tersebut berasal dari keluarga Nasrani atau Yahudi yang menganut salah satu dari kedua agama tersebut sebelum nabi Muhammad SAW diutus/diangkat menjadi rasul.

Pada dasarnya semua agama menolak perkawinan beda agama. Semua agama menghendaki perkawinan harus seiman (satu agama). Perkawinan beda agama jika diperkenankan tentu sangat terbatas dan sebagai pengecualian yang diberikan dengan persyaratan-persyaratan tertentu.

Islam mengajarkan umatnya agar hidup lurus-dalam hidayah Allah, jauh dari kesesatan karena godaan setan, jin maupun manusia. Untuk itulah maka seorang muslim dilarang menikah dengan orang musyrik sebagaimana yang diterangkan dalam surah *Al-Baqarah* ayat 221. Dalam Islam satu-satunya kemungkinan adalah karena adanya pendapat yang membolehkan perkawinan pria muslim dengan wanita kitabiyah. Pendapat yang membolehkannya mensyaratkan bahwa pernikahannya dilaksanakan dengan suatu akad. Ibnu Rusyd menulis akad dengan *ma'rifah* (menggunakan *alif lam*) menunjukkan bahwa akad tersebut adalah akad nikah yang diajarkan Islam. Konsekuensi dari perkawinan ini menempatkan pihak isteri yang kitabiyah mendapatkan segala haknya sebagai isteri. Namun kedua belah pihak tidak mempunyai hak

⁶⁸ Ihtiyanto, *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Depag RI, Jakarta, 2003, h.119.

saling mewarisi. Karena hak waris dalam Islam harus seagama antara ahli waris dengan pewarisnya.

Agama Kristen Katholik secara tegas menyatakan, “Perkawinan antara seorang Katolik dengan penganut agama lain adalah tidak sah”. (Kanon ; 1086). Gereja memberikan dispensasi dengan persyaratan yang ditentukan hukum gereja. (Kanon ; 1125). Dispensasi dalam realisasinya diberikan oleh Uskup setelah memenuhi persyaratan tertentu dan kedua belah pihak membuat perjanjian tertulis yang berisi : pertama, yang beragama Katholik berjanji akan tetap setia pada iman Katholik, berusaha memandikan dan mendidik anak-anak mereka secara Katholik. Kedua, yang tidak beragama Katholik berjanji menerima perkawinan secara Katholik, tidak akan menceraikan pihak yang beragama Katholik, tidak menghalangi pihak yang beragama Katholik melaksanakan imannya, dan bersedia mendidik anak-anaknya secara Katholik.

Agama Kristen Protestan mengajarkan kepada umatnya mencari pasangan hidup yang seagama. Menyadari adanya kehidupan bersama dengan umat yang lain, maka gereja tidak melarang penganutnya melangsungkan perkawinan dengan orang-orang yang bukan beragama Kristen. Perkawinan beda agama dapat dilangsungkan di gereja menurut hukum gereja Kristen apabila pihak yang bukan beragama Kristen menyatakan tidak keberatan secara tertulis. Gereja Kristen Indonesia telah mengatur perkawinan beda agama yang bersifat rinci, dengan

kesediaan pihak bukan Kristen untuk menikah di gereja dan anaknya dididik secara Kristen.

Dalam agama Hindu, suatu perkawinan dapat disahkan jika mempelai itu telah menganut agama yang sama, agama Hindu. Perkawinan dengan agama lain dilarang dalam agama Hindu. Menurut hukum Hindu, suatu perkawinan hanya sah kalau dilaksanakan upacara suci oleh *pedende*, dan *pedende* hanya mau melaksanakan upacara pernikahan jika kedua calon pengantin beragama Hindu. Perkawinan orang Hindu yang tidak memenuhi syarat dapat dibatalkan. Jika kedua mempelai berbeda agama, *pedende* tidak dapat memberkati, kecuali pihak yang bukan Hindu telah di-*suddhi*-kan (disahkan) sebagai pemeluk agama Hindu, dan menandatangani *Sudi Vadhani* (surat pernyataan masuk agama Hindu).

Agama Budha sebagai ajaran yang lebih banyak memperhatikan ajaran dan amalan moral dengan menitikberatkan pada kesempurnaan diri manusia, tidak mengatur secara khusus perkawinan beda agama. Agama Budha tidak membatasi umatnya untuk kawin dengan penganut agama lain menurut hukum yang berlaku. Dalam prakteknya penganut agama Budha mengikuti ketentuan hukum yang berlaku setempat (hukum adat, atau hukum negara yang berlaku).⁶⁹

Pencermatan penulis bahwa pernikahan beda agama memang sudah seharusnya tidak dilegalkan di Indonesia, terlebih pasca putusan

⁶⁹ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta; Total Media, 2006, h.84-87

Mahkamah Konstitusi putusan bernomor 68/PUU-XII/2014. Dikuatkan juga oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya yang dihasilkan dari Musyawarah Nasional II tanggal 11-17 Rajab 1400 H. Bertepatan dengan 26 Mei-1 Juni 1980 M, dengan pertimbangan *mafsadat* lebih besar daripada *maslahatnya*, lelaki muslim khususnya di Indonesia dilarang kawin dengan wanita ahli kitab.

Kondisi masyarakat menjadi penting untuk dipertimbangkan karena perkawinan dalam Islam bukan sekedar hubungan antara suami dan isteri, tetapi juga berdampak bagi masa depan dan pendidikan anak-anaknya bahkan juga melibatkan dan mempengaruhi masyarakat di sekitarnya. Kondisi kemasyarakatan terus berkembang, karena itu hukum yang penetapannya terkait dengan perkembangan kehidupan masyarakat harus dinamis, sehingga tujuan hukum dapat tercapai. Memelihara agama baik bagi perorangan maupun masyarakat menjadi kewajiban semua pihak. Karena memelihara agama menjadi salah satu tujuan Hukum Islam (*maqashid Syar'i*) disyariatkannya agama Islam kepada umat manusia. Perubahan hukum karena perubahan masyarakat, bukan dimaksudkan agar hukum mengikuti apa yang terjadi, tetapi agar hukum dapat mengatur dan membatasi masyarakat agar tidak keluar dari koridor yang diajarkan Islam, sehingga hukum dapat melindungi masyarakat dari kerusakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kronologis pengajuan kasus pencatatan perkawinan beda agama di pengadilan negeri Magelang adalah Pemohon akan segera melaksanakan perkawinan dan sudah mendaftarkan di kantor catatan sipil kota Magelang untuk dilakukan perkawinan namun oleh karena pemohon dan calon isterinya berbeda agama, dalam hal ini Pemohon beragama Islam dan calon isteri Pemohon beragama Katholik, maka kantor catatan sipil kota Magelang tidak bisa melaksanakan dan mencatat perkawinan tersebut. Kantor catatan sipil kota Magelang bisa melaksanakan dan mencatat perkawinan apabila ada surat penetapan dari pengadilan negeri Magelang yang memberikan ijin kepada pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama, sedangkan di pengadilan negeri Blora adalah Terkait dengan rencana perkawinan Pemohon dengan teman Prianya/ Sdr. Yavet Arianto bin Markus Wartono (Alm) , maka pelaksanaan lamaran dari keluarga Sdr. Yavet Arianto direncanakan akan dilaksanakan setelah mendapat Putusan/ Penetapan Pengadilan Negeri Blora tentang Izin Perkawinan Beda Agamayaitu sesaat sebelum Upacara Perkawinan dilaksanakan.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pencatatan perkawinan beda agama di pengadilan negeri Magelang bahwa perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang- Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; Adapun tujuan dari Undang- Undang tersebut adalah sebagai unifikasi atau penyeragaman hukum perkawinan yang sebelumnya sangat beragam

mengingat keberagaman masyarakat Indonesia, bahwa Pasal 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat mencatatkan perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan; Dan selanjutnya di dalam penjelasan dari pasal tersebut telah ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama dan Pengadilan Negeri Blora bahwa didalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

3. Terjadinya kontradiktif putusan pengadilan negeri Magelang dengan pengadilan negeri Blora adalah pada putusan pengadilan negeri Magelang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dan pengadilan negeri Blora menolak permohonan tersebut.
4. kajian hukum Islam menyikapi terjadinya kontradiktif antara pengadilan negeri Magelang yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dan pengadilan negeri Blora yang menolak permohonan

pencatatan perkawinan beda agama, maka hukum Islam cenderung menolak hal tersebut.

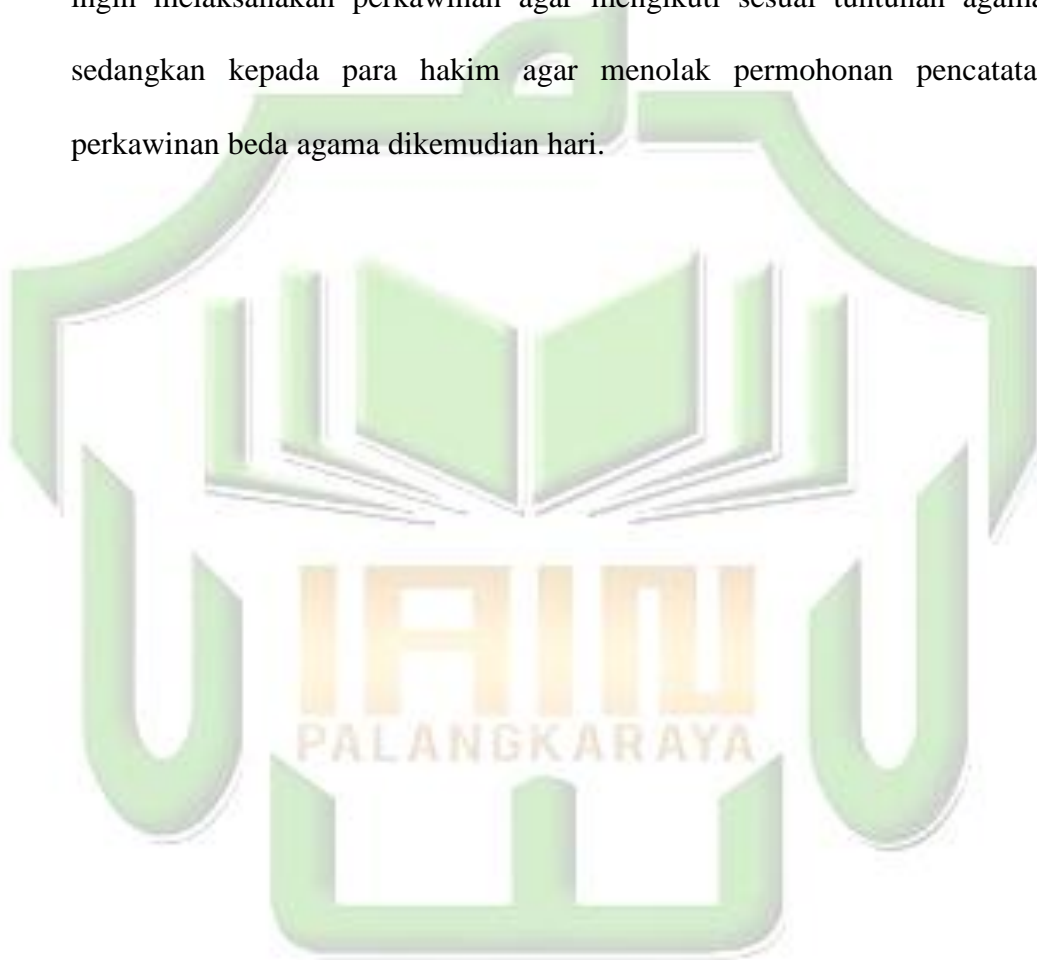
A. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun saran-saran yang peneliti berikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pencatatan Perkawinan beda agama dapat dilakukan dengan syarat adanya penetapan pengadilan negeri, sebagaimana diatur dalam pasal 35 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Sehingga hakim dalam pertimbangannya dapat memutuskan dengan sebaik-baiknya.
2. Sebuah perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (pasal 2 ayat 1 UU perkawinan). Kepada para hakim agar lebih mempertimbangkan pada aspek agama guna menjadi landasan bagi komunitas individu yang menjadi wadah kebersamaan pribadi-pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa dan turut bertanggung jawab atas terwujudnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa untuk meneruskan dan menjamin keberlangsungan hidup manusia.
3. Perkawinan adalah merupakan sebuah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kepada para pihak pria dan wanita agar mengupayakan perkawinan

sesuai dengan kepercayaannya masing-masing sehingga tidak ada perbedaan keyakinan dalam suatu bahtera rumah tangga.

4. Islam sebagai agama yang mengatur dalam segala aspek kehidupan, cenderung menolak perkawinan beda agama karena mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya, oleh karena itu kepada calon mempelai yang ingin melaksanakan perkawinan agar mengikuti sesuai tuntunan agama, sedangkan kepada para hakim agar menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama dikemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afief, Saefuddin, *Notaris Syariah dalam Praktik Jilid Ke I Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Darunnajah Publishing, 2011.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Ke-2, Jakarta: SinarGrafika, 2007, h. 8.
- Aripin, Jaenal, Nurlaelawati, Euis, Jahar, Saepudin, Asep, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2013.
- Asikin Zainal, dan Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Barkatullah, Abdul halim dan Prasetyo, Teguh, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta; PT RajaGrafindo Prenada, 2012.
- Departemen Agama RI, *Mushaf Alquran Terjemah*, Jakarta : Al-Huda, 2005.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta : Kencana, 2007.
- Efendi, A'an, & Susanti, Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: 2014.
- Goesniadhie, Kusnu, *Harmonisasi Sistem Hukum Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*, Jawa Timur; Nasa Media, 2010.
- Ichtiyanto, *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Depag RI, Jakarta, 2003.
- Kamil, Ahmad, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Karsayuda, M, *Perkawinan Beda Agama menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta; Total Media, 2006.

- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016.
- Manullang, Fernando M., *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.
- Mappiasse, Syarif, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta : Kencana, 2015.
- Meliala, Jaja S., *Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Bandung: Nuansa Mulia, 2015.
- Nuh, Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung : Pustaka Setia, 2011.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram*, Jakarta : Robbani Press, 2000, h. 216
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta; Sinar Grafika, 2011.
- Rumokoy, Donald Albert & Maramis, Frans, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Rusli dan Tama, R, *Perkawinan antar Agama dan Permasalahannya*, Bandung: Pionir jaya, 2000.
- Sadiani, *Nikah via Telepon, Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Malang: Intimedia, 2008.
- Salim, & Nurbani, Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta : Rajawali Press, 2014.
- Saebani, Beni Ahmad, Falah, Syamsul, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2003.

Sodiqin, Ali Dkk, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Buku Materi Pembelajaran Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Perss, 2010)

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2011.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. Ke-3 Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.

Tama, R dan Rusli, *Perkawinan antar Agama dan Permasalahannya*, Bandung: Pionir jaya, 2000.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya Press, 2007.

B. Jurnal, Skripsi, dan Internet

Latipulhayat, Atif, *Khazanah Jeremy Bentham*, Bandung: Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, volume Nomor 2 Tahun 2015

Mahardhika, Youhastha Alva Tryas, *Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Studi Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Se Kota Yogyakarta Terhadap Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006)*, (Skripsi), Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, t.d. <http://digilib.uinsuka.ac.id/5827/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> (diakses 22 Februari 2018).

Ningsih, Ratna Jati, *Perkawinan Beda Agama (Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah)*, (Skripsi), Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2012, t.d. <http://eprints.iainsurakarta.ac.id/421/1/Perkawinan%20Beda%20Agama.pdf> (diakses 22 Februari 2018).

Nur, Siti Fina Rosiana, *Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak yang dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan*, (Skripsi), Depok: Universitas Indonesia, 2012, t.d. <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20309013-S42529Perkawinan%20beda.pdf> (Diakses 22 Februari 2018).

Pratiwi, Intan, Pernikahan Pasangan Beda Agama, (skripsi), Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, t.d.
<http://eprints.ums.ac.id/31792/2/03>. Halaman Depan.pdf (diakses 22 Februari 2018)

Sayyad, Muhammad Amin, “Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution Tentang Urgensi Pencatatan Nikah Masuk Rukun Nikah”, *Skripsi Sarjana*, Palangkaraya: Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya, 2017.

C. Undang-Undang dan Putusan

Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 60A Ayat (1) dan (2)

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 Ayat (1)

Direktori Pengadilan Negeri, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/>

Putusan Pengadilan Negeri Magelang nomor : 04/pdt.P/2012/PN.MGL

Putusan Pengadilan Negeri Blora nomor : 71/pdt.P/2017/PN Bla